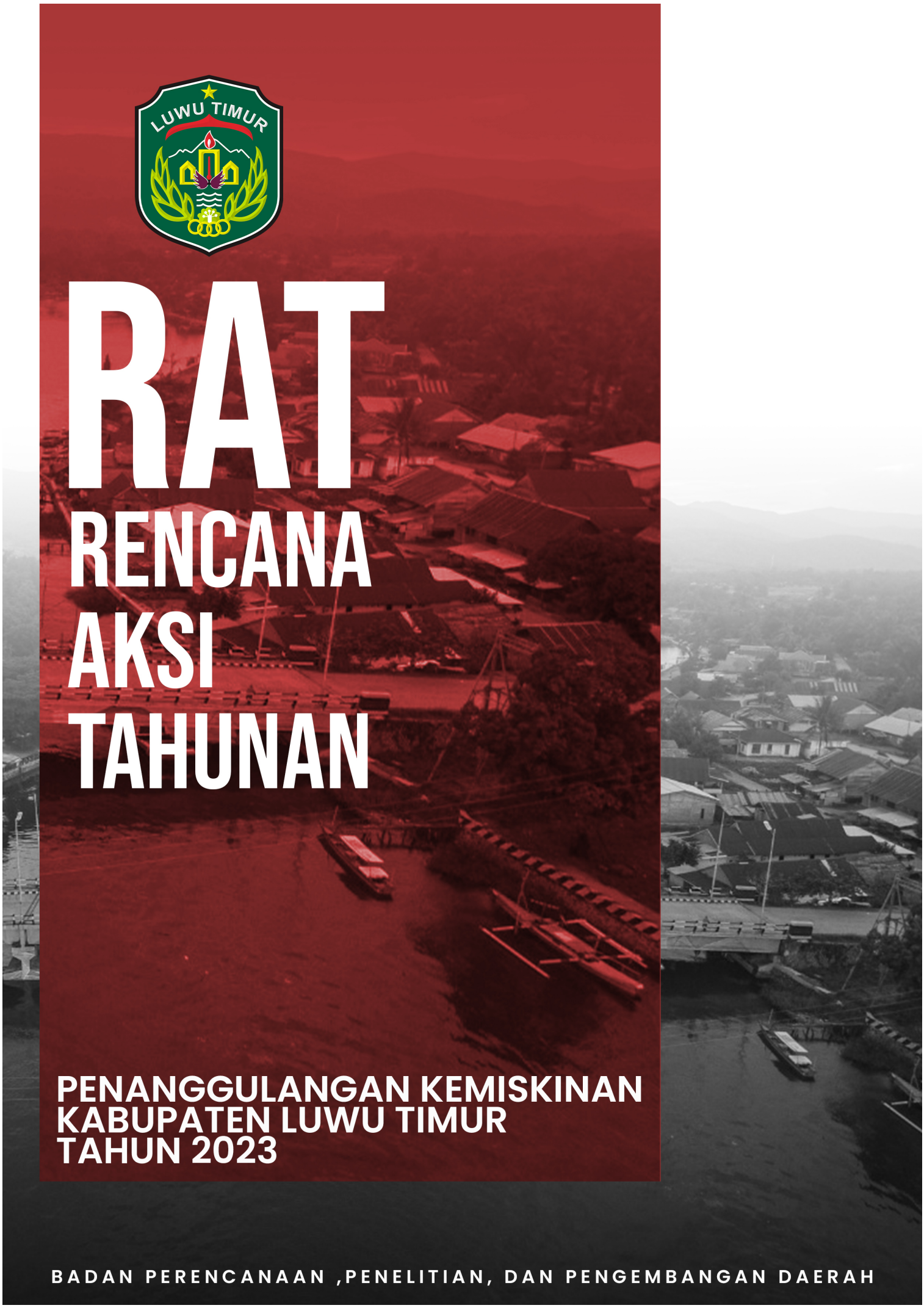

RAT
RENCANA AKSI TAHUNAN

PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2023

BADAN PERENCANAAN ,PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH

KATA PENGANTAR

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota.

Selanjutnya Pemerintah telah membentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), sedangkan di daerah dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi dan Kabupaten/Kota. TKPK daerah memiliki tugas melakukan koordinasi perumusan, kebijakan, perencanaan, dan pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di lingkup Provinsi.

Dalam rangka mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan di daerah perlu disusun rencana terhadap usaha-usaha penanggulangan kemiskinan di daerah. Sebagai tindak lanjut disusunlah Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Luwu Timur guna melihat perencanaan dan evaluasi pelaksanaan dan capaian penanggulangan kemiskinan di daerah serta untuk menjelaskan rencana penanggulangan kemiskinan. Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 yang merupakan turunan dari Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Luwu Timur 2021-2026 dan juga diselaraskan dengan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026.

Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2021 memuat rencana program/kegiatan penanggulangan kemiskinan yang bersumber dari APBD Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023. Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 dapat dijadikan acuan dalam perumusan kebijakan penanggulangan kemiskinan dan dengan pelaksaanaannya diharapkan dapat menurunkan tingkat kemiskinan di Kabupaten Luwu Timur

serta pada akhirnya dapat mewujudkan **Luwu Timur yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya**

Luwu Timur, Maret 2023

KEPALA BAPELITBANGDA
KABUPATEN LUWU TIMUR

Drs. DOHRI AS'ARI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**
DAFTAR ISI ..... **iii**
DAFTAR GAMBAR ..... **vii**
DAFTAR TABEL ..... **xvi**
DAFTAR GRAFIK ..... **xx**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Tujuan Dan Manfaat 2
1.2.1 Tujuan 2
1.2.2 Manfaat 3
1.3 Landasan Kebijakan 4
1.4 Sistematika RPKD 5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN TAHUN 2022 ..... **6**
2.1 Bidang Konsumsi Pengeluaran 6
2.1.1 Persentase Penduduk miskin (P0) 7
2.1.2 Indeks kedalaman kemiskinan (P1) 9
2.1.3 Indeks keparahan kemiskinan (P2) 10
2.1.4 Jumlah penduduk miskin 12
2.1.5 Garis Kemiskinan 13
2.1.6 Persentase Penduduk Miskin Ekstrem dan Jumlah Penduduk Ekstrem 14
2.1.7 Tingkat Ketimpangan Pengeluaran (Gini Ratio) 15
2.2 Bidang Ketenagakerjaan 16
2.2.1 Angkatan Kerja 16
2.2.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 17
2.2.3 Tingkat Pengangguran Terbuka 19
2.3 Bidang Pendidikan 20
2.3.1 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI 20
2.3.2 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs 21
2.3.3 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI 22
2.3.4 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs 24
2.3.5 Harapan Lama Sekolah 25
2.3.6 Angka Buta Huruf Penduduk Usia 15+ 26
2.3.7 Persentase Penduduk Usia 7-24 Tahun yang Sudah Tidak Bersekolah lagi 28
2.4 Bidang Kesehatan 29
2.4.1 Kelahiran Ditolong Tenaga Kesehatan Terlatih 29

2.4.2 Angka Kematian Bayi (AKB) (Per 1000 Kelahiran Hidup) 30
2.4.3 Angka Kematian Balita (AKBA) (Per 1000 Kelahiran Hidup) 32
2.4.4 Angka Kematian Ibu (Per 100.000 Kelahiran Hidup) 33
2.4.5 Rasio Dokter Per satuan Penduduk 34
2.4.6 Penduduk Yang Menderita Sakit Sebulan Terakhir 35
2.5 Bidang Infrastruktur Dasar 37
2.5.1 Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak 37
2.5.2 Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak 38
2.5.3 Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Listrik 39
2.6 Bidang Ketahanan Pangan 40
2.6.1 Perkembangan Harga Beras 40
2.6.2 Persentase Rumah Tangga Penerima Program Raskin/BPNT 42
2.6.3 Perkembangan harga Bahan Pokok Utama 43
2.7 Poverty Brief Tahun 2022 48
BAB III KEBIJAKAN DAN STRATEGI TAHUN 2023 54
BAB IV PENUTUP 75

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Analisis Evaluasi Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2022 7
Gambar 2.2 Analisis Evaluasi Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2022 9
Gambar 2.3 Analisis Evaluasi Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2022 10
Gambar 2.4 Analisis Evaluasi Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2022..... 12
Gambar 2.5 Analisis Evaluasi Garis Kemiskinan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2022..... 13
Gambar 2.6 Analisis Evaluasi Persentase Penduduk Miskin Ekstrem Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020-2022 14
Gambar 2.7 Analisis Evaluasi Ketimpangan Pengeluaran (Gini Ratio) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018-2022 15
Gambar 2.8 Analisis Evaluasi Angkatan Kerja Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2022.... 16
Gambar 2.9 Analisis Evaluasi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2022 17
Gambar 2.10 Analisis Evaluasi Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2022 19
Gambar 2.11 Analisis Evaluasi Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2021 20
Gambar 2.12 Analisis Evaluasi Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2021 21
Gambar 2.13 Analisis Evaluasi Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2021 22
Gambar 2.14 Analisis Evaluasi Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2021..... 24
Gambar 2.15 Analisis Evaluasi Harapan Lama Sekolah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2021 25
Gambar 2.16 Analisis Evaluasi Angka Buta Huruf Penduduk Usia 15+ Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018-2021..... 26
Gambar 2.17 Analisis Evaluasi Penduduk Usia 7-24 Tahun yang Sudah Tidak Bersekolah Lagi Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2022..... 28
Gambar 2.18 Analisis Evaluasi Kelahiran Ditolong Tenaga Kesehatan Terlatih Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2020 29
Gambar 2.19 Analisis Evaluasi Angka Kematian Bayi (AKB) (per 1000 Kelahiran Hidup) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2021..... 30

Gambar 2.20 Analisis Evaluasi Angka Kematian Balita (AKBA) (Per 1000 Kelahiran Hidup) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2021 32
Gambar 2.21 Analisis Evaluasi Angka Kematian Ibu (Per 100.000 Kelahiran Hidup) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2020 33
Gambar 2.22 Analisis Evaluasi Rasio Dokter Per satuan Penduduk Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2021 34
Gambar 2.23 Analisis Evaluasi Penduduk Yang Menderita Sakit Sebulan Terakhir Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2021 35
Gambar 2.24 Analisis Evaluasi Proporsi Rumah Tangga Dengan Sanitasi Layak Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2021 37
Gambar 2.25 Analisis Evaluasi Proporsi Rumah Tangga Dengan Air Minum Layak Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018-2022 38
Gambar 2.26 Analisis Evaluasi Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Listrik Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2022 39
Gambar 2.27 Analisis Evaluasi Perkembangan Harga Beras Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 40
Gambar 2.28 Analisis Evaluasi Persentase Rumah Tangga Penerima Program Raskin/BPNT Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2021 42

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perkembangan Harga Bahan Pokok Utama Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020-2022 43

Tabel 2.2 Profil Kemiskinan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2022 44

Tabel 3.1 Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 55

Tabel 3.2 Matriks Prioritas Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 59

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan dan meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pembangunan nasional dilaksanakan secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap, dan berkelanjutan untuk memacu peningkatan kemampuan nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa yang lebih maju.

Tujuan pembangunan itu sendiri adalah ingin menjadikan lebih makmur dan ingin agar demokrasi menjadi lebih sempurna, suatu kehidupan nasional yang lebih sempurna yang dapat memberikan akomodasi kepada aneka warna kebudayaan bangsa, dan dapat menghasilkan lebih banyak karya yang bisa membanggakan sebagai bangsa (Koentjaraningrat, 2002 :4). Upaya penanggulangan Kemiskinan adalah salah satu langkah konkrit yang harus diselenggarakan untuk mempercepat terwujudnya tujuan pembangunan nasional di Indonesia.

Dalam rangka upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber DayaManusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota. Sebagai tindaklanjutnya Pemerintah telah membentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), sedangkan di daerah dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui Permendagri No. 53 Tahun 2020 sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang mendelegasikan pembentukan, tugas pokok dan fungsi TKPK di daerah. TKPK daerah memiliki tugas melakukan koordinasi perumusan, kebijakan, perencanaan, dan pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Dalam rangka pelaksanaan tugas koordinasi kebijakan penanggulangan kemiskinan, TKPK daerah menjalankan fungsi diantaranya melakukan penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) yang merupakan suatu dokumen strategis daerah yang digunakan sebagai dasar kebijakan pembangunan daerah pada bidang penanggulangan kemiskinan daerah yang dimuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berisi berbagai kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan di daerah sesuai dengan karateristik dan kearifan lokal.

Penyusunan RPKD merupakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Perubahan Permendagri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2011 tentang PercepatanPelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2011 dan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan, diselaraskan atau dipadukan dengan Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 – 2026. Dan untuk percepatan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan perlu disusun perencanaan jangka pendek dalam bentuk Rencana Aksi Tahunan Penanggulangan Kemiskinan. Rencana Aksi Tahunan (RAT) adalah rencana kerja pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan untuk periode 1 (satu) tahun.

Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah daalam mendukung upaya penanggulangan kemiskinan adalah dengan menempatkan kemiskinan sebagai agenda utama kebijakan. Untuk itu perlu perumusan masalah kemiskinan yang lebih komprehensif. Rencana Aksi Tahunan (RAT) diharapkan dapat menjadi pemicu percepatan penanggulangan kemiskinan melalui pendekatan yang komprehensif dan terpadu sertapelaksanaannya dilakukan secara bertahap, terencana dan berkesinambungan. Pelaksanaan Rencana Aksi Tahunan (RAT) ini diharapkan dapat melibatkan seluruh pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.

1.2 Tujuan dan Manfaat

1.2.1 Tujuan

Tujuan penyusunan dokumen Rencana Aksi Tahunan (RAT) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 adalah:

1. Terintegrasinya Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Luwu Timur ke dalam RKPD Kabupaten Luwu Timur;

2. Sebagai dasar dalam menyusun rancangan kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan yang dimuat dalam dokumen Renja Kerja (Renja) OPD;
3. Menegaskan komitmen dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dan daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan dan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDG's*) terutama tujuan penanggulangan kemiskinan;
4. Implementasi Permendagri Nomor 53 Tahun 2020 bahwa TKPK Provinsi menyusun RATsebagai agenda tahunan penanggulangan kemiskinan daerah.

1.2.2 Manfaat

Manfaat dari penyusunan dokumen Rencana Aksi Tahunan (RAT) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 antara lain adalah:

1. Sebagai referensi dalam memberikan arah dan pedoman bagi pemerintah daerah untuk menjadikan penanggulangan kemiskinan sebagai arus utama (*mainstreaming*) dalam penyusunan program kerja di daerah;
2. Menegaskan komitmen dan mendorong sinergitas berbagai upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Kemasyarakatan, Pelaku Usaha, Lembaga Internasional, dan pihak-pihak pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk mengatasi kemiskinan di Kabupaten Luwu Timur;
3. Membangun konsensus bersama untuk mengatasi kemiskinan dengan pendekatan partisipatif dan pemberdayaan dalam perumusan kebijakan dan strategi penanggulangan kemiskinan;
4. Mewujudkan dokumen perencanaan sebagai payung kebijakan dalam penanganan kemiskinan di daerah dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari dokumen perencanaan dan anggaran daerah, didayagunakan untuk menyusun langkah (rencana aksi) yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan, melalui serangkaian program dan kegiatan dalam satu wadah koordinasi yang lebih mantap, komprehensif, sinergis, akseleratif dan berkelanjutan.

5. Sebagai pedoman bagi setiap satuan kerja pelaksana dalam menyusun perencanaan kerja yang *pro poor, pro growth* dan *pro jo*b yang mempercepat penanggulangan kemiskinan.

1.3 Landasan Kebijakan

Beberapa landasan hukum/Kebijakan terkait penyusunan Dokumen Rencana Aksi Tahunan (RAT) TAhun 2023, adalah:

1. UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN;
2. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. UU Nomor 11 Tahun 2005 tentang pengesahan Konvensi Internasional tentang Hak- Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya;
4. UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN tahun 2005-2025;
5. Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024;
6. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
7. Kepres Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tim Koordinasi Peningkatan dan Perluasan Program Pro-Rakyat;
8. Inpres Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan
9. Inpres Nomor 14 Tahun 2011 tentang Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Nasional Tahun 2011;
10. Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Permendagri 53 Tahun 2020 tentang Perubahan Permendagri 42 Tahun 2010 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota;
12. INPRES No. 4 Tahun 2022; Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah Republik Indonesia pada tahun 2O24, melalui keterpaduan dan sinergi program, serta kerja sama antarkementerian / lembaga maupun pemerintah daerah;
13. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI. (Kepmenko PMK) Nomor 25Tahun 2022. Tentang Kabupaten/Kota Prioritas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2022-2024. Untuk melaksanakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem perlu menetapkan lokasi prioritas

penghapusan kemiskinan ekstrem yang diperluas dari 35 kabupaten menjadi 212 kabupaten/kota pada tahun 2022 dan selanjutnya mencakup seluruh kabupaten/kota pada tahun 2023-2024;

14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perda Nomor I Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 -2023;
15. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 523/II/ Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2023
16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
17. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 289/F-02/IX/ Tahun 2022 Tentang perubahan Atas Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 37/F-02/II/2021 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.

1.4 Sistematika RPKD

Sebagai sebuah dokumen strategis yang menjadi acuan dalam upaya penanggulangan kemiskinan, dokumen Rencana Aksi Tahunan (RAT) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 disusun secara sistematis dan terstruktur dengan ruang lingkup mencakup:

Bab I : Pendahuluan ;
Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2022 ;
Bab III : Arah Kebijakan Pembangunan dan Rencana Aksi Tahun 2023;
Bab IV : Penutup

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN TAHUN 2022

Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022 merupakan bagian penting dari siklus perencanaan yang berfungsi untuk memberikan masukan dan sebagai dasar mengambil keputusan tentang tingkat keberhasilan yang telah dicapai dan tindakan selanjutnya yang diperlukan.

Dalam bab ini kemiskinan dibahas dari dua sisi, yaitu indikator kemiskinan yang berbasis ***konsumsi atau pengeluaran***, serta kemiskinan dari sisi multidimensi yang terdiri dari ***beberapa bidang kebutuhan dasar***. Paket analisis dalam membahas masing-masing bidang melalui empattahapan sebagai berikut :

1. Analisis posisi relatif yang berisikan penjelasan Posisi capaian indikator Kabupaten Luwu Timur terhadap kabupaten/kota diProvinsi Sulawesi selatan
2. Analisis perkembangan antar waktu yang berisikan penjelasan :
   a) Perkembangan capaian indikator dalam setahun terakhir
   b) Pola perubahan capaian indikator tahun ke tahun (konsisten/fluktuatif)
3. Analisis efektivitas yang berisikan penjelasan :
   a) Perubahan capaian selama periode kebijakan tertentu (RPJMD)
   b) Perubahan antar periode kebijakan (antar periode RPJMD)
4. Analisis relevansi perkembangan dari kondisi kemiskinan tersebut yang berisikan penjelasan pola perubahan daerah terhadap pola perubahan di tingkat yang lebih tinggi atau lebih luas.

2.1 Bidang Konsumsi Pengeluaran

Pengukuran kemiskinan berbasis konsumsi atau pengeluaran pada dasarnya menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Beberapa indikator yang dihasilkan dari konsep kemiskinan ini diantaranya,persentase penduduk miskin (P0), Jumlah Penduduk Miskin, indeks kedalaman kemiskinan (P1), indeks keparahan kemiskinan (P2), serta tentunya Garis Kemiskinan (GK) yang dijadikan patokan atau penentuan status kemiskinannya, Tingkat kemiskinan ekstrim, tingkat ketimpangan, serta dibahas juga tentang DataTerpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang berkaitan dengan bidang pengeluaran yang nantinya menjadi sasaran program dan prioritas wilayah. Analisa lengkapnya dijabarkan dibawah ini.

2.1.1 Persentase Penduduk miskin (P0)

Gambar 2.1 Analisis Evaluasi Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2022

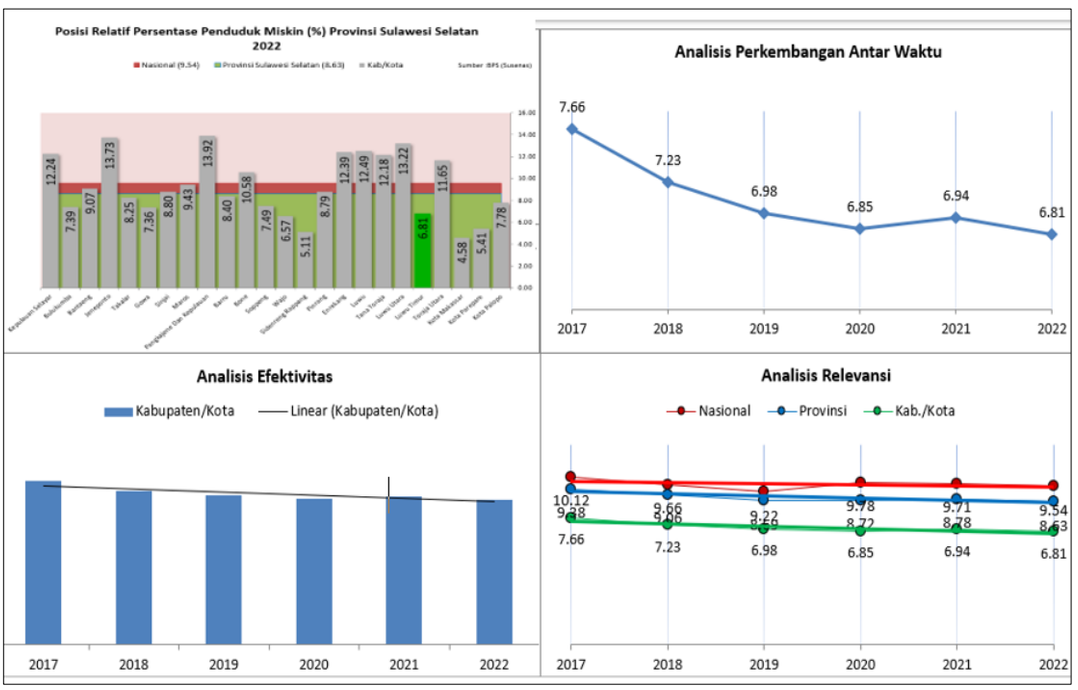

Sumber: BPS diolah

Kondisi Karakteristik Masalah Persentase Penduduk Miskin :

a. Posisi Relatif:
   - ✓ Pada tahun 2022 tingkat kemiskinan Provinsi Sulawesi selatan sebesar 8,63%, lebih rendah dari capaian Nasional (9,54%).
   - ✓ Pada tingkat Kab/Kota, di tahun 2021 terdapat 9 Kabupaten yang capaian nya diatas Provinsi Sulawesi selatan dan nasional, kemudian 2 Kab/Kota yang capaian nya diatasProvinsi Sulawesi selatan namun sudah dibawah

nasional, sisanya sebanyak 13 Kab/Kota termasuk Kabupaten Luwu Timur telah berada dibawah Provinsi Sulawesi selatan dan nasional. Ini menggambarkan bahwa sebagian besar kab/kota di Prov Sulsel sudah menunjukkan capaian yang lebih baik dari capaian Nasional dan capaian Prov Sulsel.

- ✓ Pada Tahun 2022 Kabupaten Luwu Timur berada di posisi ke-5 terendah untuk Persentase tingkat kemiskinan di antara 24 Kab/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Capaiannya sebesar 6.81%, posisi pertama terendah adalah Kota Makassar dengan capaian 4.58% dan posisi tertinggi dengan capaian 13.92% di tempati oleh Kabupaten Pangkajene & Kepulauan. Angka 6.81% masih berada di atas target RPJMD untuk tahun 2022 yaitu sebesar 6.64%.
- ✓ Target Persentase Tingkat kemiskinan Kabupupaten Luwu Timur dalam dokumen RPJMD 2021–2026 adalah 5.84% pada tahun 2026. Target tahun 2026 tersebut diharapkan bisa tercapai, walaupun masih berada pada tahap pemulihan ekonomi pasca pandemi covid19 sejak tahun 2020 yang membuat banyak perubahan di berbagai bidang kehidupan. Kondisi ini menyebabkan masyarakat kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya.

b. Perkembangan Antar Waktu:

- ➢ Jika dilihat tren pada periode tahun 2017-2022, persentase penduduk miskin Kabupaten Luwu Timur mengalami penurunan dari 7.66% menjadi 6.81%. Terjadi penurunan sebesar 0,85%. Penurunannya konsisten setiap tahunnya sampai tahun 2020 sebesar 6,85% tetapi kemudian terus mengalami kenaikan di tahun berikutnya sampai tahun 2022 kembali turun dari 6.94% di tahun 2021 menjadi 6.81%.
- ➢ Apabila dilihat pada tren ataupun pola perubahan pada periode 2017-2022 menunjukan Tren penurunan yang konsisten meskipun lajunya dirasa cukup lambat.

c. Efektivitas:

- ▪ Secara keseluruhan capaian indikator tingkat kemiskinan di Kabupaten Luwu Timur menunjukkan penurunan sebesar 0.85% walaupun penurunannya sangat lambat dalam kurun waktu 6 tahun terakhir. Jika dihitung dalam 6 tahun Pemerintah Kabupaten Luwu Timur hanya mampu menurunkan 0.141% tingkat kemiskinannya setiap tahunnya. Sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan yang diselenggarakan oleh Pemkab sudah efektif walaupun masih belum maksimal dan membutuhkan langkah-langkah strategis dan massif untuk mencapai target RPJMD di tahun 2026 sebesar 5.84%.

d. Relevansi:

- ➢ Tren dan pola perubahan antara capaian tingkat kemiskinan Kabupaten Luwu Timur dengan Provinsi Sulawesi selatan dan capaian Nasional dapat dikatakan cukup beriringan mulai tahun 2017 hingga tahun 2022. Hal ini berarti capaian indikator tingkat kemiskinan di Kabupaten Luwu Timur

pada tahun 2017-2021 relevan dengan capaian Provinsi Sulawesi Selatan dan juga dengan capaian Nasional.

2.1.2 Indeks kedalaman kemiskinan (P1)

Gambar 2.2 Analisis Evaluasi Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2022

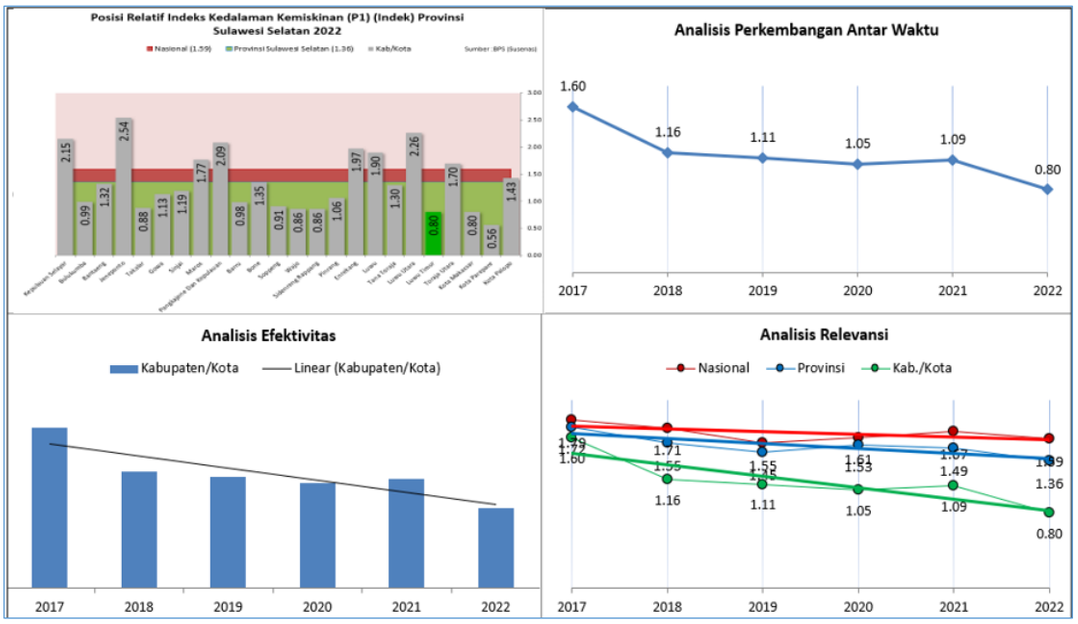

Sumber: BPS diolah

Kondisi Karakteristik Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) :

a. Posisi Relatif:

- ✓ Pada Tahun 2022 indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Luwu Timur sebesar 0.80%, lebih rendah dari Provinsi Sulawesi selatan yang sebesar 1,36% dan dari capaian Nasional (1,59%).
- ✓ Pada tingkat Kab/Kota di tahun 2022, terdapat 6 Kab/Kota yang capaiannya di atas capaian Nasional, sebanyak 5 Kab/Kota capaiannya berada di atas ProvinsiSulawesi selatan dan di bawah capaian Nasional. Sisanya sebanyak 13 kab/kota termasuk Kabupaten Luwu Timur sudah berada dibawah capaian Prov Sulsel dan tentu saja di bawah capaian Nasional. Ini menggambarkan bahwa Sebagian besar kab/kota di Prov Sulsel sudah menunjukkan capaian yang lebih baik dari capaian Nasional dan capaian Prov Sulsel.

b. Perkembangan Antar Waktu:

- ➢ Pada periode 2017-2022 indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Luwu Timur mengalami penurunan dari 1.60% menjadi 0.80%.
- ➢ Apabila dilihat pada tren ataupun pola perubahan pada periode 2017-2022 menunjukan Tren penurunan yang cenderung konsisten dengan laju yang cukup lambat hanya terjadi penurunan sebesar 0,8% dalam kurun waktu 6 tahun terakhir.

c. Efektivitas:

- Pada Periode 2017–2022 terjadi penurunan sebesar 0.8% dari 1.60% di tahun 2017 menjadi 0.8% di tahun 2022. adanya pola penurunan indeks kedalaman kemiskinan ini menunjukkan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemprov Sulsel sudah efektif tetapi masih harus perlu dimaksimalkan karena masih terdapat kesenjangan pengeluaran antara masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan.

d. Relevansi:

- Pada tahun 2017 hingga tahun 2022, Tren dan pola perubahan antara capaian Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Luwu Timur dengan capaian Provinsi Sulawesi selatan dan capaian Nasional cukup beriringan sehingga secara kesekuruhan hubungan ketiganya dapat dikatakan relevan.

2.1.3 **Indeks keparahan kemiskinan (P2)**

Gambar 2.3 Analisis Evaluasi Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2022

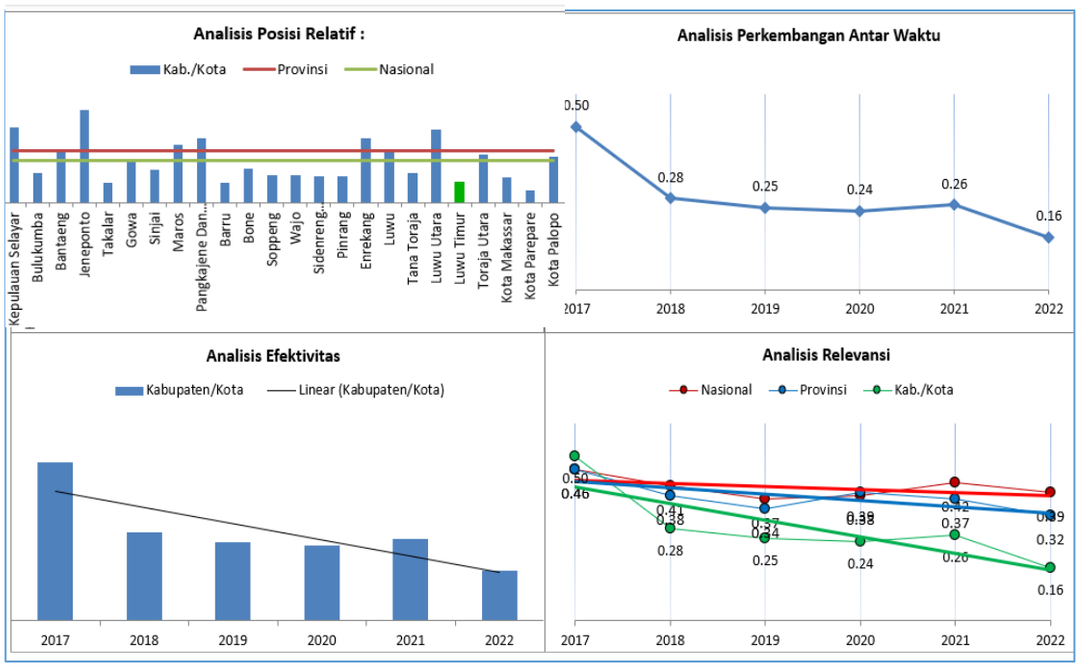

Sumber: BPS diolah

Karakteristik Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) :

a. Posisi Relatif:
   - Pada tahun 2022 indeks Keparahan kemiskinan Kabupaten Luwu Timur 0.16% lebih rendah dari capaian Provinsi Sulawesi selatan sebesar 0,32% dan dari capaian Nasional (0,40%).
   - Pada tingkat Kab/Kota di tahun 2022, terdapat 4 kab/kota yang capaiannya diatas Provinsi Sulawesi selatan dan nasional, 5 Kab/Kota yang capaiannya diatas Provinsi Sulawesi selatan namun dibawah nasional, sisanya sebanyak 15 Kab/Kota termasuk Kabupaten Luwu Timur telah berada dibawah Provinsi Sulawesi selatan dan nasional. Ini menggambarkan bahwa Sebagian besar kab/kota menunjukkan capaian yang lebih baik dari capaian prov Sulsel dan Nasional
b. Perkembangan Antar Waktu:
   - Pada Periode tahun 2017-2022 indeks Keparahan kemiskinanKabupaten Luwu Timur mengalami penurunan dari 0.50% menjadi 0.16%.
   - Apabila dilihat tren ataupun pola perubahannya, pada periode 2017-2022 menunjukan Tren penurunan yang cenderung konsisten setiap tahunnya meskipun cukup lambat karena hanya sebesar 0.34% selama 6 tahun terakhir.
c. Efektivitas:
   - Pada Periode 2017–2022, menunjukkan adanya pola penurunan indeks Keparahan kemiskinan. Jika dilihat tren-nya terjadi penurunan, sehingga bisa disimpulkan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan untuk menurunkan persentase keparahan kemiskinan sudah efektif. Namum masih harus lebih dimaksimalkan karena masih ada kesenjangan pengeluaran antar penduduk miskin.
d. Relevansi:
   - Pada tahun 2017 hingga tahun 2022, Tren dan pola perubahan antara capaian Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Luwu Timur dengan capaian Provinsi Sulawesi selatan dan capaian Nasional cukup beriringan. Seaca keseluruhan dapat dikatakan bahwa perkembangan capaian ketiganya relevan.

2.1.4 Jumlah penduduk miskin

Gambar 2.4 Analisis Evaluasi Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2022

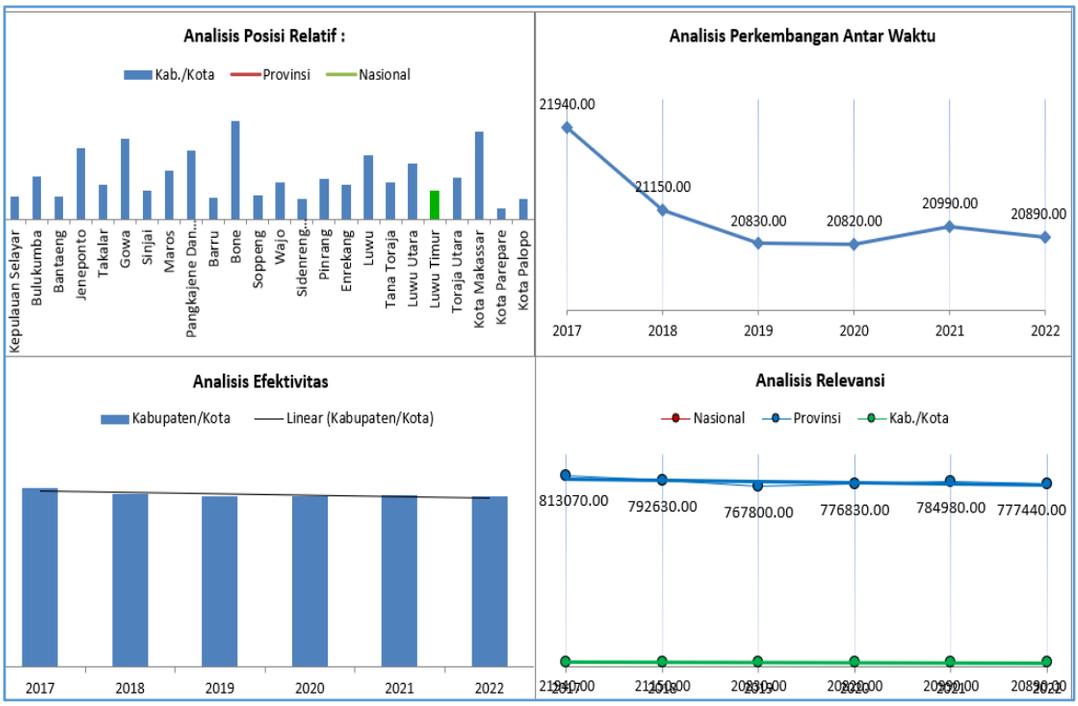

Sumber: BPS diolah

Kondisi Karakteristik Jumlah Penduduk Miskin :

a. Posisi Relatif:
   - Pada Tahun 2022 jumlah penduduk miskin Kabupaten Luwu Timur mencapai 20890 jiwa, lebih rendah dari capaian provinsi dan Nasional.
   - Pada tingkat Kab/Kota, semua menunjukkan angka yang lebih rendah dari capaian Provinsi Sulsel dan juga tentu saja lebih rendah dari capaian Nasional.

b. Perkembangan Antar Waktu:
   - Pada Periode Tahun 2017-2022, Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Luwu Timur mengalami penurunan dari 21940 jiwa menjadi 20890 jiwa. Pada tahun 2020 mengalami penurunan yang sedikit lebih baik dibandingkan tahun sebelum dan sesudahnya yaitu sebesar 20820 jiwa, namun kemudian mengalami peningkatan jumlah di tahun 2021 menjadi 20990 jiwa diakibatkan oleh banyaknya masyarakat yang terdampak Covid19, dan selanjutnya perlahan membaik di tahun setelahnya yaitu tahun 2022 menjadi 20890 jiwa. Apabila dilihat pada tren ataupun pola perubahan pada periode 2017- 2022 menunjukan Tren penurunan yang fluktuatif

c. Efektivitas:
   - Pada Periode tahun 2017–2022, adanya pola penurunan jumlahpenduduk miskin terutama pada periode 2017-2020. Penurunan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Luwu Timur hanya sebanyak 1050 jiwa dalam kurun

waktu 6 tahun terakhir, hanya sebesar 175 jiwa per tahunnya. Angka ini masih menunjukkan perlambatan penurunan jumlah penduduk miskin, sehingga dibutuhkan Langkah-langkah strategis dan konkrit dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Walaupun dapat disimpulkan jika upaya pemerintah sudah efektif menurunkan jumlah penduduk miskin.

d. Relevansi:

- Pada tahun 2017 hingga tahun 2022, Tren dan pola perubahan antara capaian jumlah penduduk miskin Kabupaten Luwu Timur dengan capaian Provinsi Sulawesi selatan dan capaian Nasional dapat dikatakan cukup beriringan. Atau dapat dikatakan perkembangan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Luwu Timur relevan dengan capaian persentase penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional.

2.1.5 **Garis Kemiskinan**

Gambar 2.5 Analisis Evaluasi Garis Kemiskinan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2022

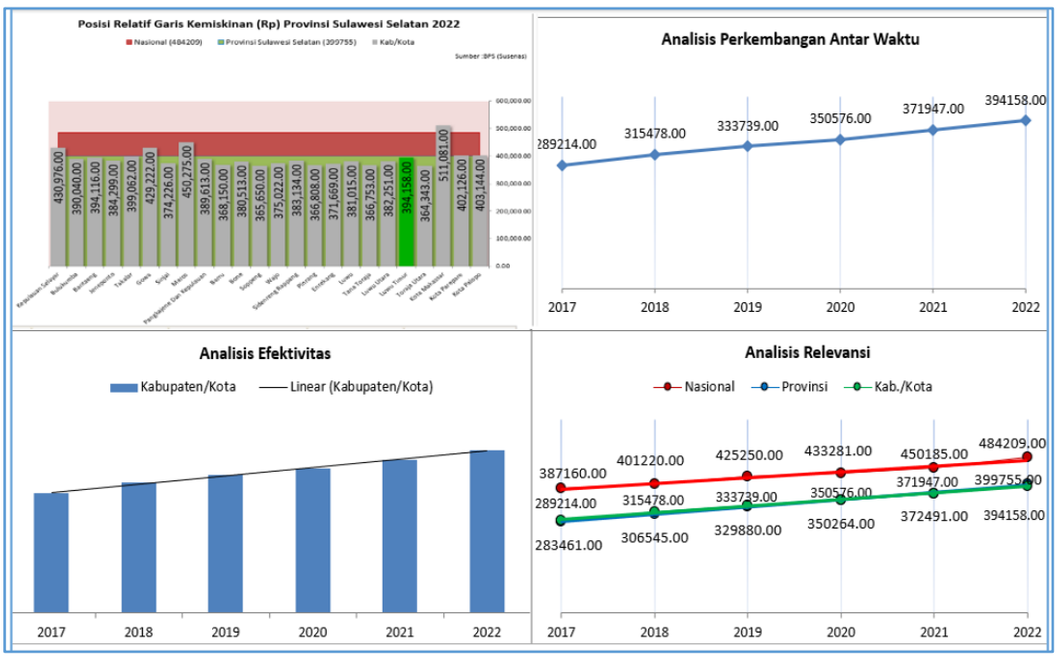

Sumber: BPS diolah

Kondisi karakteristik Garis Kemiskinan :

a. Posisi Relatif:

- Pada Tahun 2022 garis kemiskinan Kabupaten Luwu Timur sebesar Rp 394.158,- per kapita per bulan, lebih rendah dari capaian Provinsi (Rp 399.755,-) dan Nasional (Rp 484.209,-)
- Pada tingkat Kab/Kota di tahun 2022 terdapat 1 kab/kota yang garis kemiskinannya di atas Nasional, terdapat 16 kab/Kota yang garis kemiskinannya di atas Provinsi Sulawesi selatan dan di bawah nasional, sisanya sebanyak 7 kab/kota termasuk Kabupaten Luwu Timur berada di

bawah garis kemiskinan Provinsi Sulawesi selatan dan nasional.

b. Perkembangan Antar Waktu:

- Pada Periode Tahun 2017-2022, Garis kemiskinan Kabupaten Luwu Timur mengalami kenaikan dari Rp 289.214,- di tahun 2017 terus meningkat menjadi Rp 394.158,- di tahun 2022.
- Apabila dilihat pada tren ataupun pola laju pertumbuhan garis kemiskinan, pada periode 2017-2022 menunjukan pola kenaikan yang konsisten.

c. Efektivitas:

- Pada Periode tahun 2017–2022, laju pertumbuhan garis kemiskinan begitu konsisten mengalami kenaikan di setiap tahunnya. Hal ini sangat dipengaruhi oleh harga dari komoditi yang dikonsumsi masyarakat juga menunjukkan kenaikan harga. Sehingga dapat disimpulkan upaya pemerintah untuk menurunkan garis kemiskinan belum efektif.

d. Relevansi:

- Pada tahun 2017 hingga tahun 2022, garis kemiskinan Kabupaten Luwu Timur lebih rendah dibandingkan Provinsi Sulawesi selatan dan nasional. Secra Tren dan pola perubahan antara gariskemiskinan Kabupaten Luwu Timur dengan Provinsi Sulawesi selatan dan nasional dapat dikatakan sangat beriringan, artinya pola kenaikannya hampir sama antara Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi selatan dan nasional, yang berbeda hanya besaran angka dan perubahannya di setiap tahunnya. Jadi hubungan ketiganya relevan.

2.1.6 Persentase Penduduk Miskin Ekstrem dan Jumlah Penduduk Ekstrem

Gambar 2.6 Analisis Evaluasi Persentase Penduduk Miskin Ekstrem Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020-2022

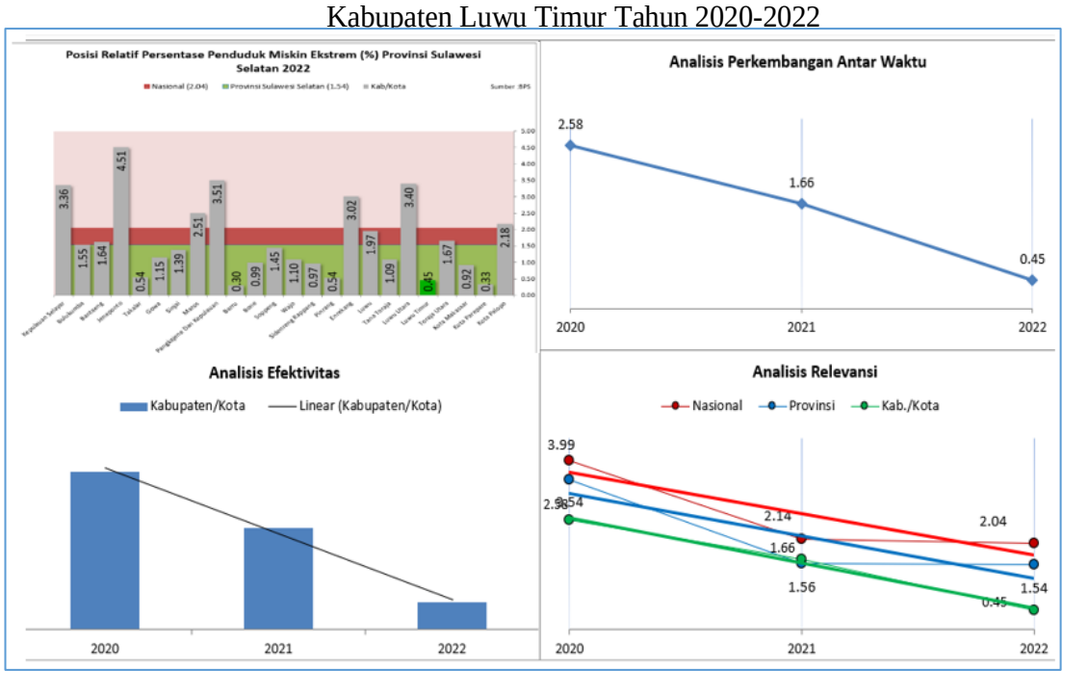

Sumber: BPS diolah

Gambaran Kondisi Kemiskinan Ekstrem (<1,9$ PPP) Tahun 2020-2022 Kabupaten Luwu Timur:

- ✓ Kemiskinan ekstrem didefinisikan sebagai kondisi dimana kesejahteraan masyarakat berada di bawah garis kemiskinan esktrem setara dengan USD 1,9 PPP (*Purchasing Power Parity*). Kemiskinan ekstrem diukur menggunakan *absolute poverty measure* yang konsisten antar negara dan antar waktu.
- ✓ Berdasarakan Data Tahun 2022, Secara persentase penduduk miskin Ekstrem di Kabupaten Luwu Timur sudah mencapai 0.45%. Angka tersebut berada dibawah rata-rata Provinsi sebesar 1.54% dan Nasional sebesar 2.04%.
- ✓ Pada tingkat Kab/Kota tahun 2022, terdapat 7 Kab/Kota yang kondisinya di atas persentase penduduk ekstrem Provinsi Sulawesi selatan dan Nasional, sementara 5 Kab/Kota berada di atas angka provinsi namun sudah di bawah Nasional, sedangkan sebanyak 13 Kab/Kota termasuk Kabupaten Luwu Timur telah berada dibawah angka Provinsi Sulawesi selatan maupunNasional.
- ✓ Perkembangan antar waktu persentase penduduk miskin ekstrem Kabupaten Luwu Timur sejak tahun 2020 sampai 2022 menunjukkan penurunan angka capaian, dari 2.58% menjadi 0.45%.
- ✓ Penurunan angka capaian dari tahun 2020 ke 2022 sebesar 2.13% menunjukkan upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem di provinsi sulsel sudah efektif.
- ✓ Berdasarkan tren sejak tahun 2020 ke tahun 2022 menunjukkan relevansi penurunan capaian Kabupaten Luwu Timur dengan capaian Provinsi Sulawesi Selatan dan capaian Nasional. Sehingga dapat disimpulkan jika capaian ketiganya relevan.

2.1.7 Tingkat Ketimpangan Pengeluaran (Gini Ratio)

Gambar 2.7 Analisis Evaluasi Ketimpangan Pengeluaran (Gini Ratio) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018-2022

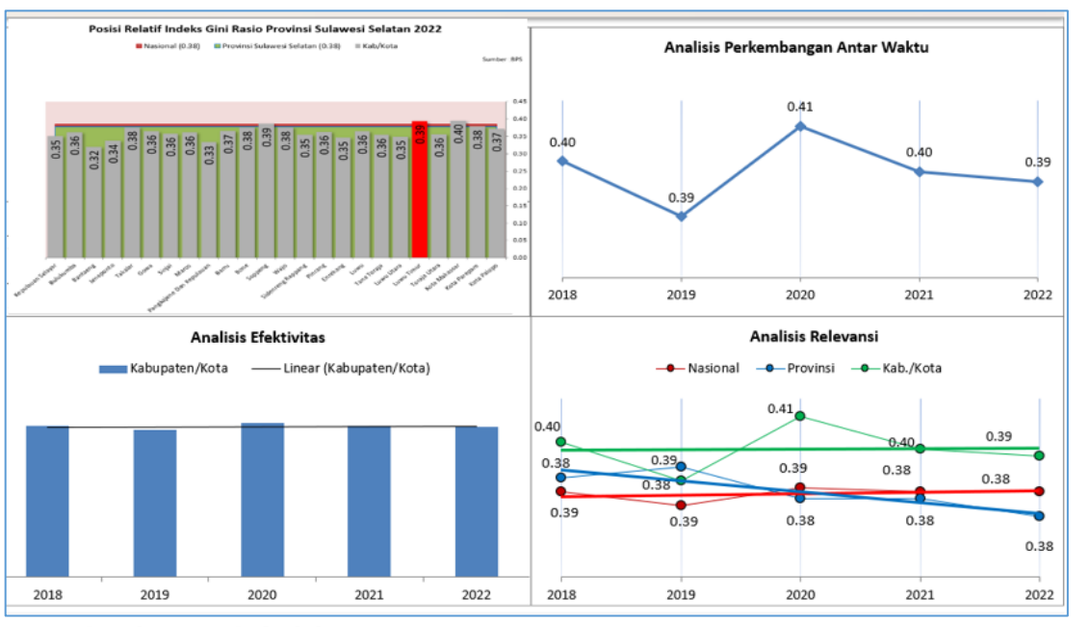

Sumber: BPS diolah

Kondisi Karakteristik Masalah Ketimpangan Pengeluaran :

a. Posisi Relatif:

✓ Pada Tahun 2022 tingkat ketimpangan pengeluaran *(Gini Ratio)* Kabupaten Luwu Timur sebesar 0.39. Capaiannya Lebih tinggi dari capaian Provinsi dan Nasioanl (0.38)

✓ Target ketimpangan pengeluaran *(Gini Ratio)*Provinsi Sulawesi selatan pada RPJMD 2021–2026 yaitu 0.389 di tahun 2022. Artinya target RPJMD belum tercapai.

b. Perkembangan Antar Waktu:

✓ Pada Periode tahun 2018-2022 tingkat ketimpangan pengeluaran di Kabupaten Luwu Timur mengalami penurunan dari 0.40 menjadi 0.39

✓ Apabila dilihat pada tren ataupun pola perubahan pada periode 2018- 2022 menunjukan Tren penurunan meskipun lajunya sangat lambat.

c. Efektivitas:

✓ Pada Periode tahun 2018–2022, tingkat ketimpangan pengeluaran mengalami tren penurunan yang perkembangannya fluktuatif dari tahun ke tahun, hal ini menunjukkan bahwa upaya Kabupaten Luwu Timur sudah efektif dalam menurunkan tingkat ketimpangan pengeluaran walaupun belum bisa memenuhi target RPJMD.

2.2 Bidang Ketenagakerjaan

2.2.1 Angkatan Kerja

Gambar 2.8 Analisis Evaluasi Angkatan Kerja Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2022

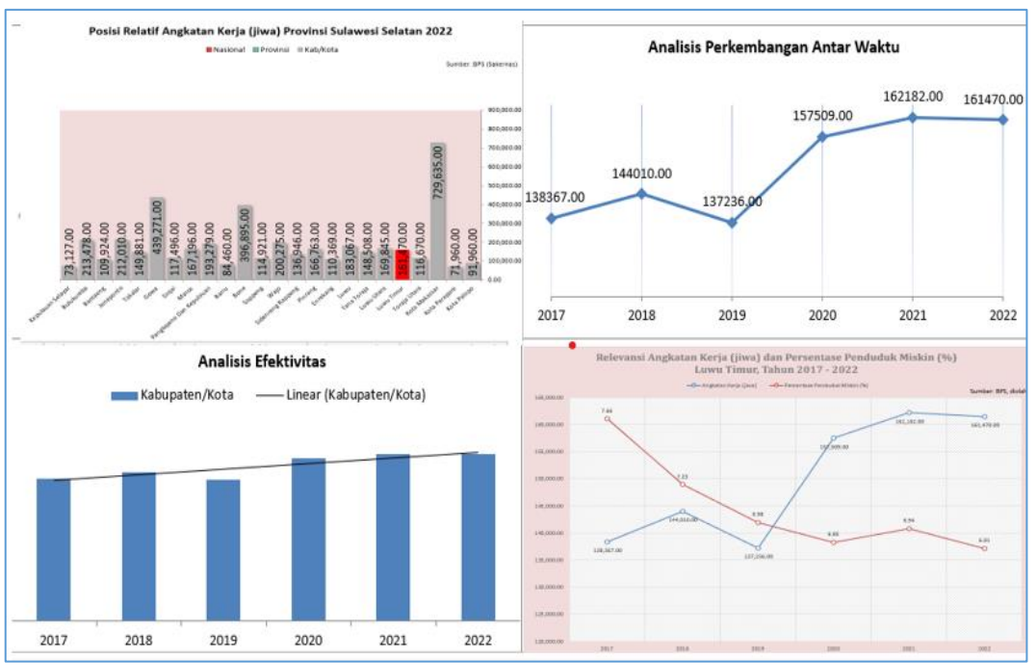

Sumber: BPS diolah

Kondisi Karakteristik Angkatan Kerja :

a. Posisi Relatif:

b. Pada Tahun 2022 Jumlah Angkatan Kerja Kabupaten Luwu Timur sebanyak 161470 jiwa. Lebih rendah dari capaian Provinsi dan Nasional.

c. Perkembangan Antar Waktu:

✓ Pada Periode tahun 2017-2022, jumlah angkatan kerja di Kabupaten Luwu Timur mengalami kenaikan dari 138367 jiwa menjadi 161470 jiwa. Perkembangan angka capaiannya fluktuatif.

d. Efektivitas:

✓ Pada Periode 2017–2022, jumlah angkatan kerja mengalami tren yang fluktuatif menunjukkan kenaikan jumlah capaian, kondisi pandemi covid-19 ternyata tidak merubah pola perubahan angkatan kerja di periode Agustus 2020 yang harusnya terjadi penurunan, namun justru mengalami kenaikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa program-program penanggulangan kemiskinan yang bertujuan untuk peningkatan capaian jumlah Angkatan kerja di Provinsi Sulawesi selatan cukup efektif.

e. Relevansi:

✓ Tren dan pola perubahan antara capaian Jumlah Angkatan Kerja Kabupaten Luwu Timur dengan capaian persentase penduduk miskin dapat dikatakan tidak beriringan, karena persentase penduduk miskin menunjukkan penurunan sejak 2017 sampai 2022 sementara capaian Angkatan kerja mengalami kenaikan di periode tersebut. Tetapi ini merupakan capaian yang berkesesuain. Idealnya semakin tinggi jumlah Angkatan kerja maka akan semakin mudah menurunkan tingkat kemiskinan. Jadi capaian keduanya relevan.

2.2.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Gambar 2.9 Analisis Evaluasi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2022

Sumber: BPS diolah

Kondisi Karakteristik Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) :

a. Posisi Relatif:

- Pada Tahun 2022 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Luwu Timur mencapai 71.51%, lebih tinggi dari capaian provinsi (66.18%) nasional (68.63%).
- Pada tingkat kab/kota di tahun 2022, terdapat 8 kab/kota termasuk Kabupaten Luwu Timur yang capaiannya diatas Provinsi Sulawesi selatan dan Nasional. 4 kab/kota berada di atas Provinsi Sulawesi selatan dan di bawah Nasional. Serta sisanya sebanyak 12 kab/kota lainnya berada dibawah TPAK provinsi dan Nasional.

b. Perkembangan Antar Waktu:

- Pada Periode Tahun 2017-2022, TPAK Kabupaten Luwu Timur mengalami kenaikan dari 70.03% menjadi 71.51%. Hal ini menunjukan terjadi peningkatan setiap tahunnya selama 6 tahun terakhir sebesar 1.48 poin artinya rata-rata peningkatan setiap tahunnya sebesar 0.24%.

c. Efektivitas:

- Dalam 6 tahun terakhir yaitu 2017–2022, TPAK mengalami tren kenaikan yang fluktuatif, kondisi pandemi covid-19 ternyata tidak merubah pola perubahan TPAK di periode 2020 yang harusnya bisa membuka peluang terjadinya penurunan, namun justru mengalami kenaikan. Tetapi terjadi penurunan di tahun 2022 dari 73.14% menjadi 71.51%. walaupun demikian secara umum masih bisa dikatakan upaya pemerintah sudah efektif, namun masih harus bekerja keras untuk meningkatkan capaiannya.

d. Relevansi:

- Tren dan pola perubahan antara capaian TPAK Kabupaten Luwu Timur dengan capaian Provinsi dan Nasional dapat dikatakan cukup beriringan dimulai pada tahun 2017 hingga tahun 2022. Hal ini menunjukkan pola perkembangan ketiganya relevan.

2.2.3 Tingkat Pengangguran Terbuka

Gambar 2.10 Analisis Evaluasi Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2022

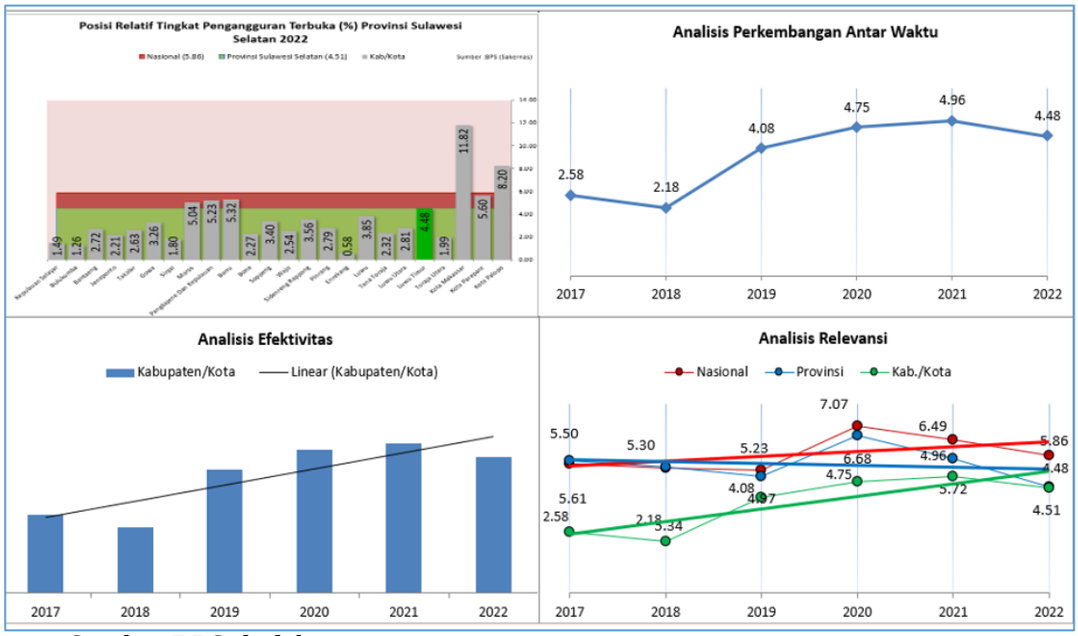

Sumber:BPS diolah

Kondisi Karakteristik Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) :

a. Posisi Relatif:

- Pada tahun 2022 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Luwu Timur mencapai 4.48%, lebih rendah dari TPT provinsi (4.51) dan (nasional (5.86 %)
- Pada tingkat kab/kota di tahun 2022, terdapat 4 kab/kota yang kondisi TPT nya diatas ProvinsiSulawesi selatan dan Nasional. Dan 2 kab/kota berada diatas provinsi namun dibawah Nasional. Sedangkan sisanya sebanyak 18 kab/kota lainnya termasuk Kabupaten Luwu Timur capaiannya sudah dibawah TPT Provinsi Sulawesi selatan maupun Nasional.

b. Perkembangan Antar Waktu:

- Pada Periode tahun 2017-2018, TPT Kabupaten Luwu Timur mengalami penurunan dari 2.58% menjadi 2.18%. Kemudian mengalami kenaikan drastis di tahun 2019 dengan capaian 4.08% dan meningkat terus sampai tahun 2021 menjadi 4.96% dan mengalami penurunan di tahun 2022 menjadi 4.48%.

c. Efektivitas:

- Pada Periode tahun 2017–2022, TPT mengalami tren yang fluktuatif, namun cenderung menunjukkan tren kenaikan. Kenaikan terparah di tahun 2021. Secara umum menggambarkan program penanggulangan kemiskinan yang bertujuan untuk menurunkan tingkat pengangguran terbuka dinyatakan belum efektif.

d. Relevansi:

- Tren dan pola perubahan antara capaian TPT Kabupaten Luwu Timur dengan capaian Provinsi dan Nasional dapat dikatakan cukup beriringan dimulai pada

tahun 2017 hingga tahun 2022. Jadi dapat dinyatakan jika hubungan ketiganya relevan.

2.3 Bidang Pendidikan

2.3.1 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI

Gambar 2.11 Analisis Evaluasi Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2021

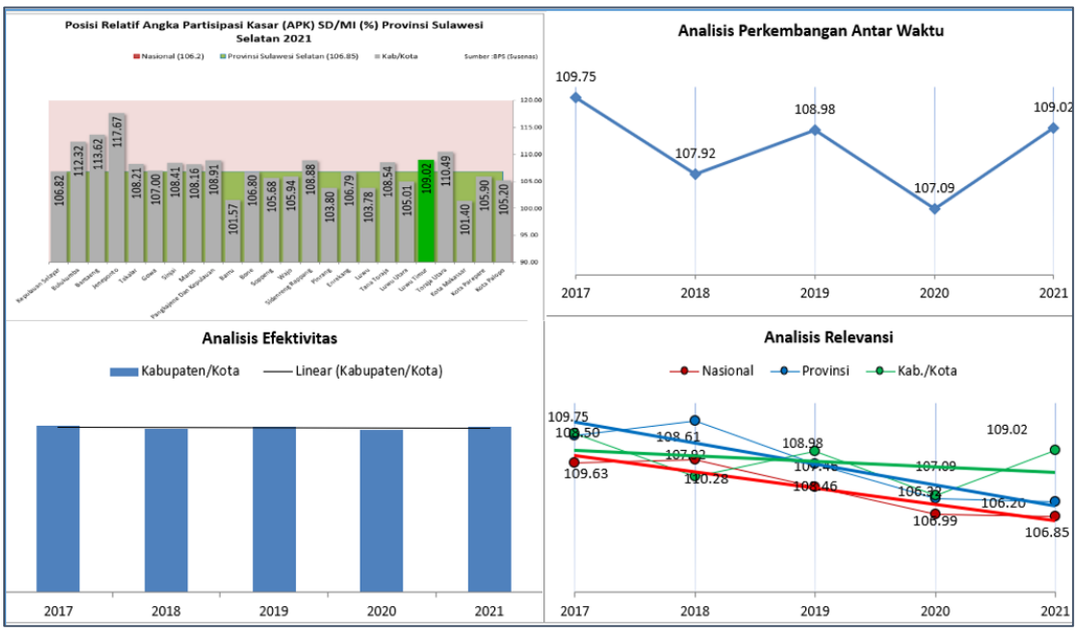

Sumber:BPS diolah

Kondisi Karakteristik Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI :

a. Posisi Relatif:

- Pada tahun 2021 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI Provinsi Sulawesi selatan mencapai 106.85% lebih tinggi dari Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI Nasional (106.2%). Pada tingkat kab/kota, terdapat 11 kab/kota termasuk Kabupaten Luwu Timur yang kondisi Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI-nya diatas ProvinsiSulawesi selatan dan Nasional. 4 Kab/kota di bawah Provinsi dan di atas capaian Nasional, sementara sisanya ada 9 kab/kota berada di bawah Nasional dan di bawah capaian Provinsi.
- Kabupaten Luwu Timur berada pada posisi ke-5 tertinggi di antara 24 Kab/Kota se-Sulawesi Selatan dengan capaian 109.02%. Posisi tertinggi pertama ditempati Kabupaten Jeneponto dengan capaian 117.67% dan posisi terendah ditempati Kota Makassar dengan capaian 101.40%.

b. Perkembangan Antar Waktu:

- Pada Periode tahun 2017-2018, Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI Kabupaten Luwu Timur mengalami penurunan dari 109.75% menjadi 107.92%. Kemudian mengalami kenaikan drastis di di tahun 2019 dengan capaian 108.98% namun Kembali turun di tahun 2020 menjadi 107.09%, lalu meningkat di tahun 2021 menjadi 109.02% capaian ini lebih rendah dibandingkan capaian

tahun 2017. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tren penurunannya fluktuatif.

c. Efektivitas:

- Pada Periode tahun 2017–2021, Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI mengalami tren yang fluktuatif, namuncenderung menunjukkan tren penurunan. Secara umum menggambarkan program penanggulangan kemiskinan yang bertujuan untuk meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI dinyatakan belum efektif.

d. Relevansi:

- Tren dan pola perubahan antara capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI Kabupaten Luwu Timur dan Provinsi Sulawesi selatan dengan capaian Nasional dapat dikatakan cukup beriringan dimulai pada tahun 2017 hingga Agustus 2021. Jadi dapat dinyatakan jika hubungan ketiganya relevan.

2.3.2 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs

Gambar 2.12 Analisis Evaluasi Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2021

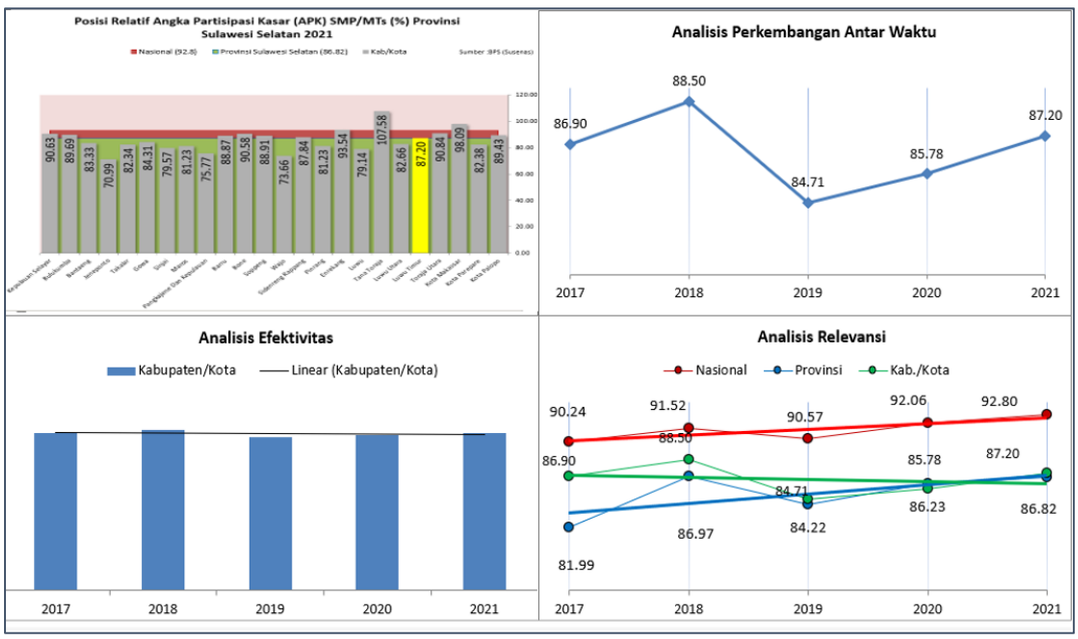

Sumber:BPS diolah

Kondisi Karakteristik Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs :

a. Posisi Relatif:

- Pada tahun 2021 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs Provinsi Sulawesi selatan mencapai 88.82% lebih rendah dari Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs Nasional (92.8%). Pada tingkat kab/kota, terdapat 3 Kab/Kota yang kondisi Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs-nya diatas ProvinsiSulawesi selatan dan Nasional. 8 Kab/Kota berada di atas provinsi di bawah capaian Nasional, dan sisanya 13 kab/kota termasuk Kabupaten Luwu Timur berada di bawah Nasional dan di bawah capaian Provinsi.

- Kabupaten Luwu Timur dengan capaian 87.20% berada pada posisi ke-12 tertinggi di antara 24 Kab/Kota se-Sulawesi Selatan. Posisi tertinggi pertama ditempati Kabupaten Tana Toraja dengan capaian 107.58% dan posisi terendah ditempati Kabupaten Jeneponto dengan capaian 70.99%.

b. Perkembangan Antar Waktu:

- Pada Periode tahun 2017-2021, Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs Kabupaten Luwu Timur mengalami peningkatan dari 86.90% menjadi 87.20%. Peningkatannya hanya 0.3% selama kurun waktu 5 tahun. Hanya meningkat 0.06% setiap tahunnya.

c. Efektivitas:

- Pada Periode tahun 2017–2021, Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs mengalami tren yang fluktuatif, namun cenderung menunjukkan tren kenaikan. Secara umum menggambarkan program penanggulangan kemiskinan yang bertujuan untuk meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs dinyatakan cukup efektif namun masih perlu kerja keras untuk meningkatkan capaiannya.

d. Relevansi:

- Tren dan pola perubahan antara capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs Kabupaten Luwu Timur dan Provinsi Sulawesi selatan dengan capaian Nasional dapat dikatakan cukup beriringan dimulai pada tahun 2017 hingga Agustus 2021. Jadi dapat dinyatakan jika hubungan ketiganya relevan.

2.3.3 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI

Gambar 2.13 Analisis Evaluasi Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2021

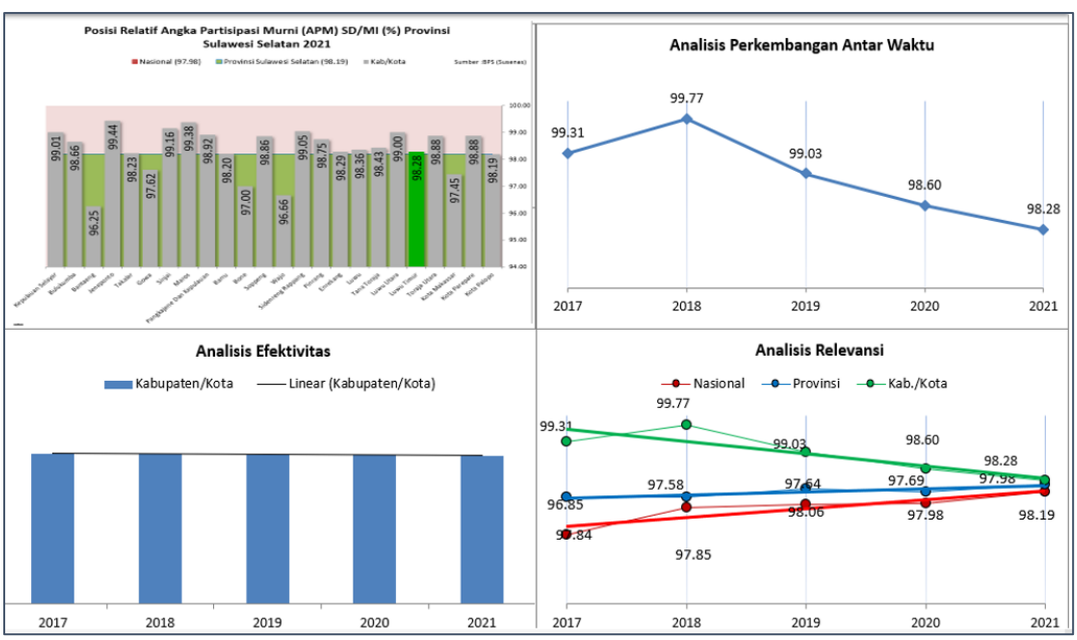

Sumber: BPS diolah

Kondisi Karakteristik Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI:

a. Posisi Relatif:

- Pada tahun 2021 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI Provinsi Sulawesi selatan mencapai 98.19% lebih tinggi dari Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI Nasional (97.98%). Pada tingkat kab/kota, terdapat 18 kab/kota termasuk Kabupaten Luwu Timur yang kondisi Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI-nya diatas ProvinsiSulawesi selatan dan Nasional. 1 Kab/Kota yang capaiannya sama dengan Provinsi tapi di atas capaian Nasional, sisanya sebanyak 5 kab/kota berada di bawah Nasional dan di bawah capaian Provinsi.
- Kabupaten Luwu Timur dengan capaian 98.28% menempati posisi ke-16 tertinggi di antara 24 Kab/Kota se-Sulawesi Selatan. Posisi tertinggi pertama ditempati oleh Kabupaten Jeneponto dengan capaian 99.44%, dan posisi terendah ditempati oleh Kabupaten Bantaeng dengan capaian 96.25%.

b. Perkembangan Antar Waktu:

- Pada Periode tahun 2017-2021, Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI Kabupaten Luwu Timur mengalami penurunan dari 99.31% menjadi 98.28%. Penurunannya sebesar 1.03% selama 5 tahun, setiap tahunnya kurang lebih menurun sebanyak 0.206%.

c. Efektivitas:

- Pada Periode tahun 2017–2021, Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI mengalami tren penurunan yang fluktuatif. Secara umum menggambarkan program penanggulangan kemiskinan yang bertujuan untuk meningkatkan Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI dinyatakan belum efektif masih sangat dibutuhkan kerja keras untuk memaksimalkan capaiannya di tahun-tahun mendatang.

d. Relevansi:

- Tren dan pola perubahan antara capaian Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi selatan dengan capaian Nasional dapat dikatakan tidak beriringan dimulai pada tahun 2017 hingga 2021. Jadi dapat dinyatakan jika hubungan ketiganya tidak relevan.

2.3.4 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs

Gambar 2.14 Analisis Evaluasi Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2021

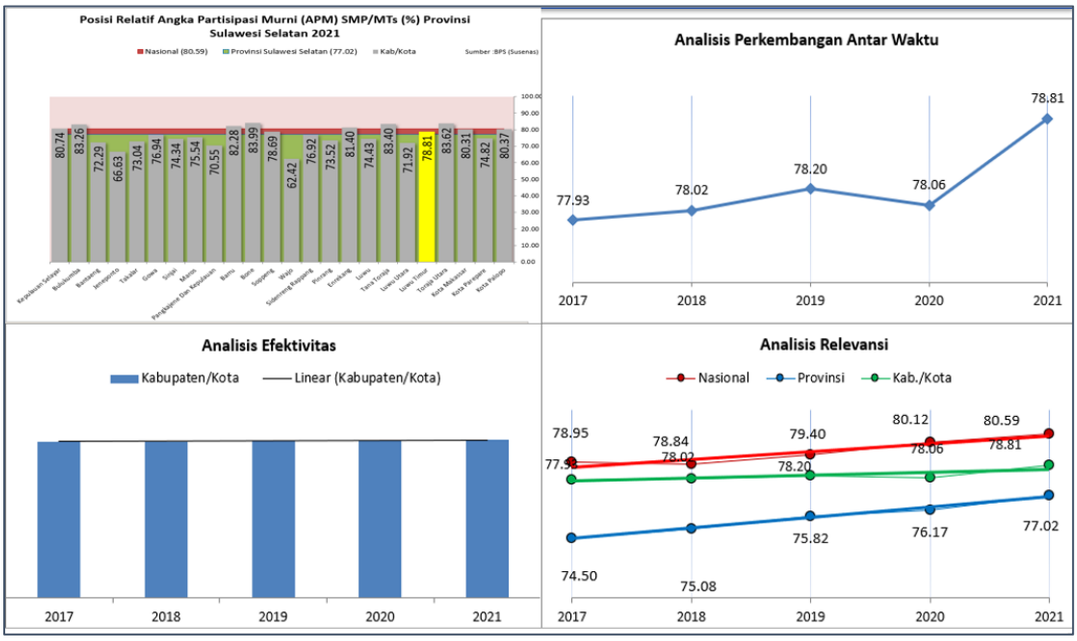

Sumber: BPS diolah

Kondisi Karakteristik Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs:

a. Posisi Relatif:

- Pada tahun 2021 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs Provinsi Sulawesi selatan mencapai 77.02% lebih tinggi dari Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs Nasional (80.59%). Pada tingkat kab/kota, terdapat 6 kab/kota yang kondisi Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs-nya diatas ProvinsiSulawesi selatan dan Nasional. 5 kab/kota termasuk Kabupaten Luwu Timur yang capaiannya di bawah Nasional di atas Provinsi. Sisanya sebanyak 13 kab/kota berada di bawah Nasional dan di bawah capaian Provinsi.
- Kabupaten Luwu Timur menempati posisi ke-9 tertinggi di antara 24 kab/kota se-Sulawesi Selatan dengan capaian 78.81%. Posisi tertinggi pertama ditempati oleh Kabupaten Bone dengan capaian 83.99% dan posisi terendah ditempati oleh Kabupaten Wajo dengan capaian 62.43%.

b. Perkembangan Antar Waktu:

- Pada Periode tahun 2017-2021, Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs Kabupaten Luwu Timur mengalami kenaikan dari 77.93% menjadi 78.81%. Sejak 2017 kenaikannya cenderung konsisten sampai tahun 2019, dan sedikit menurun di tahun 2020 menjadi 78.06% namun meningkat kembali di tahun 2021 menjadi 78.81%

c. Efektivitas:

- Pada Periode tahun 2017–2021, Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs mengalami tren kenaikan yang fluktuatif. Dari 77.93% di tahun 2017 menjadi

78.81% di tahun 2021, ini menunjukkan kenaikan yang belum maksimal. Hanya naik sebesar 0.88% dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Secara umum menggambarkan program penanggulangan kemiskinan yang bertujuan untuk meningkatkan Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs dinyatakan sudah efektiv namun masih dibutuhkan kerja keras untuk memaksimalkan capaiannya.

d. Relevansi:

- Tren dan pola perubahan antara capaian Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs Kabupaten Luwu Timur dengan Provinsi Sulawesi selatan dan capaian Nasional dapat dikatakan cukup beriringan dimulai pada tahun 2017 hingga 2021, jadi dapat dinyatakan jika hubungan ketiganya relevan.

2.3.5 Harapan Lama Sekolah

Gambar 2.15 Analisis Evaluasi Harapan Lama Sekolah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2021

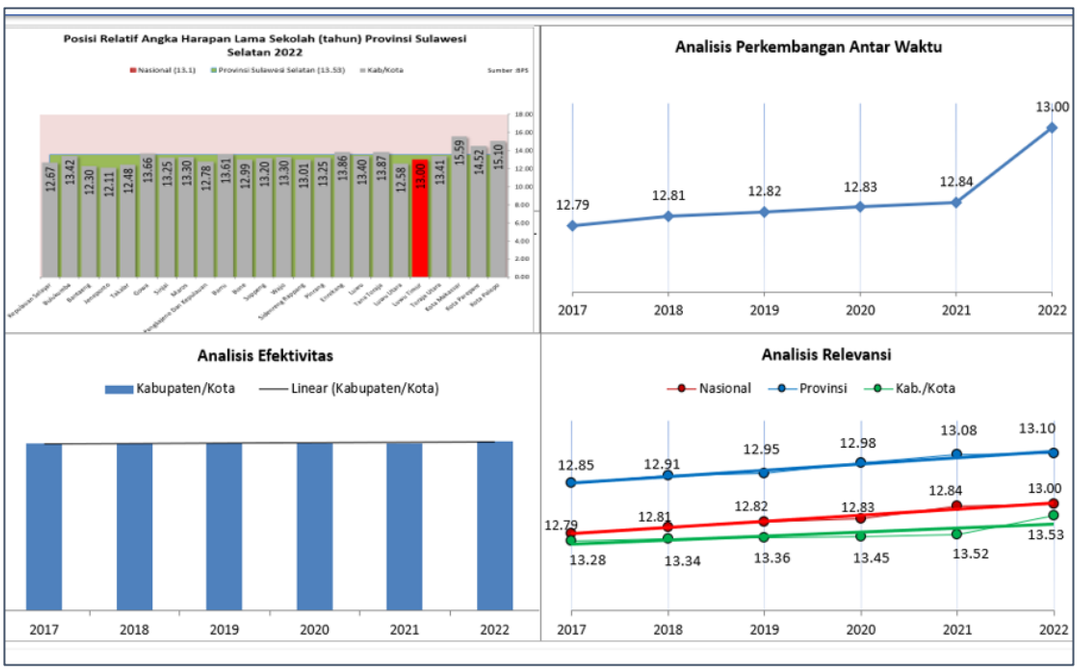

Sumber:BPS diolah

Kondisi Karakteristik Harapan Lama Sekolah :

a. Posisi Relatif:

- Pada tahun 2022 Harapan Lama Sekolah Provinsi Sulawesi selatan mencapai 13.53 tahun lebih tinggi dari Harapan Lama Sekolah Nasional (13.1 tahun). Pada tingkat kab/kota, terdapat 7 kab/kota yang kondisi Harapan Lama Sekolah-nya diatas ProvinsiSulawesi selatan dan Nasional. 7 kab/kota di bawah provinsi dan di atas capaian Nasional. Sisanya 10 kab/kota termasuk Kabupaten Luwu Timur berada di bawah Nasional dan di bawah capaian Provinsi.
- Kabupaten Luwu Timur berada pada posisi 17 tertinggi di antara 24 kab/kota se-Sulawesi Selatan dengan capaian 13 tahun. Posisi pertama tertinggi

ditempati oleh Kota Makassar dengan capaian 15.59 tahun dan posisi terendah di tempati oleh Kabupaten Jeneponto dengan capaian 12.11 tahun.

b. Perkembangan Antar Waktu:

- Pada Periode tahun 2017-2022, Harapan Lama Sekolah Kabupaten Luwu Timur mengalami kenaikan dari 12.79 tahun menjadi 13 tahun. Sejak 2017 kenaikannya cenderung konsisten sampai tahun 2022.

c. Efektivitas:

- Pada Periode tahun 2017–2022, Harapan Lama Sekolah mengalami tren kenaikan yang konsisten. Dari 12.79 tahun menjadi 13 tahun di tahun 2022, ini menunjukkan kenaikan yang belum maksimal. Hanya naik sebesar 0.21 poin dalam kurun waktu 6 tahun terakhir. Secara umum menggambarkan program penanggulangan kemiskinan yang bertujuan untuk meningkatkan Harapan Lama Sekolah dinyatakan sudah efektiv namun masih dibutuhkan kerja keras untuk memaksimalkan capaiannya.

d. Relevansi:

- Tren dan pola perubahan antara capaian Harapan Lama Sekolah Kabupaten Luwu Timur dengan Provinsi Sulawesi selatan dan capaian Nasional dapat dikatakan cukup beriringan dimulai pada tahun 2017 hingga tahun 2022. Jadi dapat dinyatakan jika hubungan ketiganya relevan.

2.3.6 Angka Buta Huruf Penduduk Usia 15+

Gambar 2.16 Analisis Evaluasi Angka Buta Huruf Penduduk Usia 15+ Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018-2021

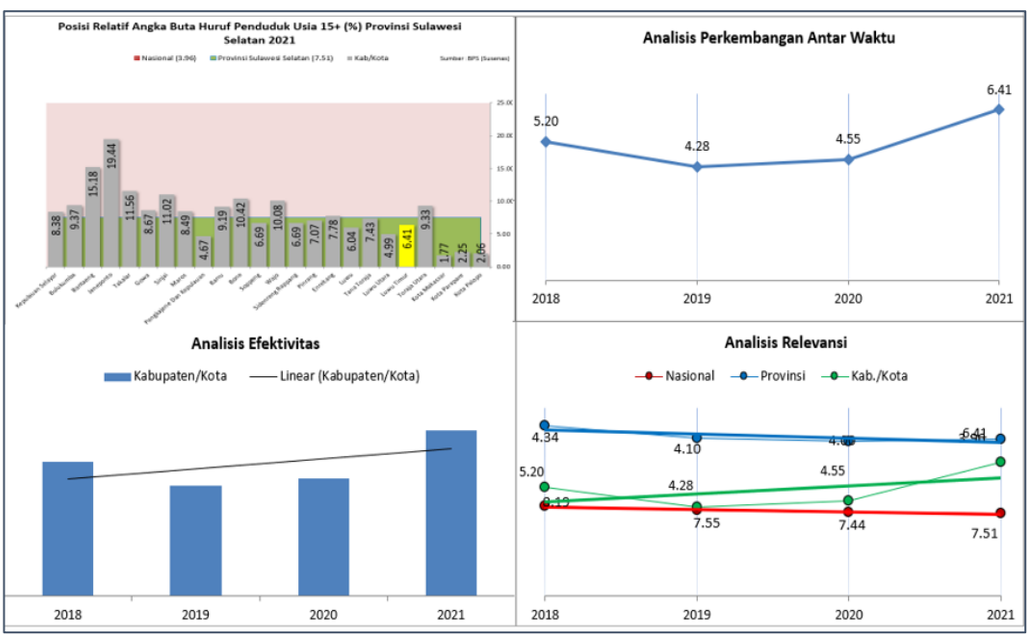

Sumber:BPS diolah

Kondisi Karakteristik Angka Buta Huruf Penduduk 15+ :

a. Posisi Relatif:

- Pada tahun 2021 Angka Buta Huruf Penduduk 15+ Provinsi Sulawesi selatan mencapai 7.51% lebih tinggi dari Angka Buta Huruf Penduduk 15+ Nasional (3.96%). Pada tingkat kab/kota, terdapat 13 kab/kota yang kondisi Angka Buta Huruf Penduduk 15+-nya diatas Provinsi Sulawesi selatan dan Nasional. 8 kab/kota termasuk Kabupaten Luwu Timur capaiannya di bawah Provinsi dan di atas capaian Nasional. Sisanya hanya 3 kab/kota berada di bawah Nasional dan di bawah capaian Provinsi.
- Kabupaten Luwu Timur berada pada posisi ke-7 terendah di antara 24 kan/kota di Sulawesi Selatan dengan capaian 6.41%. Posisi pertama terendah ditempati oleh Kota Makassar dengan capaian 1.77% dan posisi tertinggi ditempati Kabupaten Jeneponto dengan capaian 19.44%.

b. Perkembangan Antar Waktu:

- Pada Periode tahun 2018-2021, Angka Buta Huruf Penduduk 15+ Kabupaten Luwu Timur mengalami peningkatan dari 5.20% menjadi 6.41%. walaupun di tahun 2019 dan 2020 mengalami penurunan sampai ke angka 4.55% namun akhirnya mengalami kenaikan drastis di tahun 2021 menjadi 6.41%.

c. Efektivitas:

- Pada Periode tahun 2018–2021, Angka Buta Huruf Penduduk 15+ mengalami tren peningkatan yang fluktuatif. Dari 5.20% menjadi 6.41% di tahun 2021, ini menunjukkan upaya penurunan yang belum maksimal dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Secara umum menggambarkan program penanggulangan kemiskinan yang bertujuan untuk menurunkan Angka Buta Huruf Penduduk 15+ dinyatakan tidak efektif dan masih dibutuhkan kerja keras untuk memaksimalkan capaiannya.

d. Relevansi:

- Tren dan pola perubahan antara capaian Angka Buta Huruf Penduduk 15+ Kabupaten Luwu Timur dengan Provinsi Sulawesi selatan dan capaian Nasional dapat dikatakan tidak beriringan dimulai pada tahun 2017 hingga Agustus 2021. Karena capaian Provinsi dan Nasional mengalami tren penurunan sementara Kabupaten Luwu Timur mengalami tren kenaikan. Jadi dapat dinyatakan jika hubungan ketiganya tidak relevan.

2.3.7 Persentase Penduduk Usia 7-24 Tahun yang Sudah Tidak Bersekolah lagi

Gambar 2.17 Analisis Evaluasi Penduduk Usia 7-24 Tahun yang Sudah Tidak Bersekolah Lagi Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2022

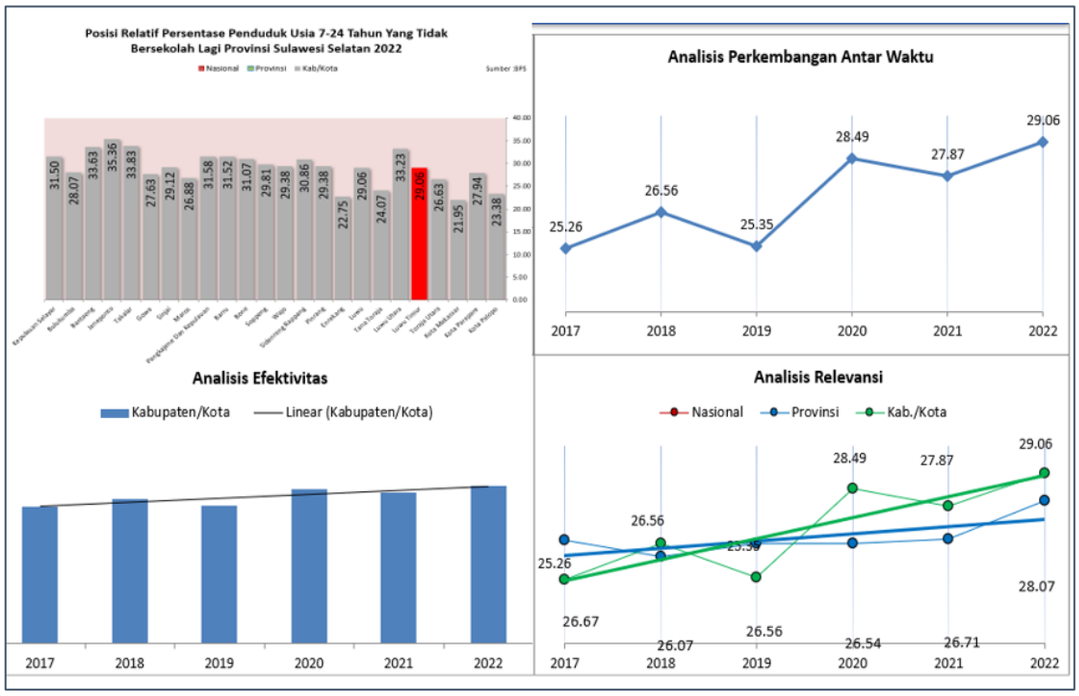

Sumber:BPS diolah

Kondisi Karakteristik Persentase Penduduk usia 7-24 tahun yang tidak bersekolah lagi:

a. Posisi Relatif:

- Pada tahun 2022 Persentase Penduduk usia 7-24 tahun yang tidak bersekolah lagi Provinsi Sulawesi selatan mencapai 28.07%. Pada tingkat kab/kota, terdapat 15 kab/kota termasuk Kabupaten Luwu Timur yang kondisi Persentase Penduduk usia 7-24 tahun yang tidak bersekolah lagi diatas ProvinsiSulawesi selatan dan 1 Kabupaten sama dengan capaian provinsi. Serta sisanya hanya 8 kab/kota berada di bawah capaian Provinsi.
- Kabupaten Luwu Timur menempati posisi ke-14 tertinggi di antara 24 kab/kota se-Sulawesi Selatan dengan capaian 29.06%. Posisi tertinggi pertama ditempati oleh Kabupaten Jeneponto dengan capaian 35.36%, posisi terendah ditempati oleh Kota Makassar dengan capaian 21.95%

b. Perkembangan Antar Waktu:

- Pada Periode tahun 2017-2022, Persentase Penduduk usia 7-24 tahun yang tidak bersekolah di Kabupaten Luwu Timur mengalami kenaikan dari 25.26% menjadi 29.06%.

c. Efektivitas:

- Pada Periode tahun 2017–2022, Persentase Penduduk usia 7-24 tahun yang tidak bersekolah lagi mengalami tren kenaikan yang fluktuatif. Dari 25.26% menjadi

29.06% di tahun 2022, ini menunjukkan kenaikan yang idealnya harus diturunkan. Angka kenaikannya sebesar 3.8 poin dalam kurun waktu 6 tahun terakhir. Secara umum menggambarkan program penanggulangan kemiskinan yang bertujuan untuk menurunkan Persentase Penduduk usia 7-24 tahun yang tidak bersekolah lagi dinyatakan belum efektif dan masih dibutuhkan kerja keras untuk memaksimalkan capaiannya.

d. Relevansi:

- Tren dan pola perubahan antara capaian Persentase Penduduk usia 7-24 tahun yang tidak bersekolah lagi Kabupaten Luwu Timur dengan capaian Penduduk usia 7-24 tahun yang tidak bersekolah lagi Provinsi Sulawesi Selatan dapat dikatakan cukup beriringan dimulai pada tahun 2017 hingga tahun 2022. Jadi dapat dinyatakan jika hubungan keduanya relevan.

2.4 Bidang Kesehatan

2.4.1 Kelahiran Ditolong Tenaga Kesehatan Terlatih

Gambar 2.18 Analisis Evaluasi Kelahiran Ditolong Tenaga Kesehatan Terlatih Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2020

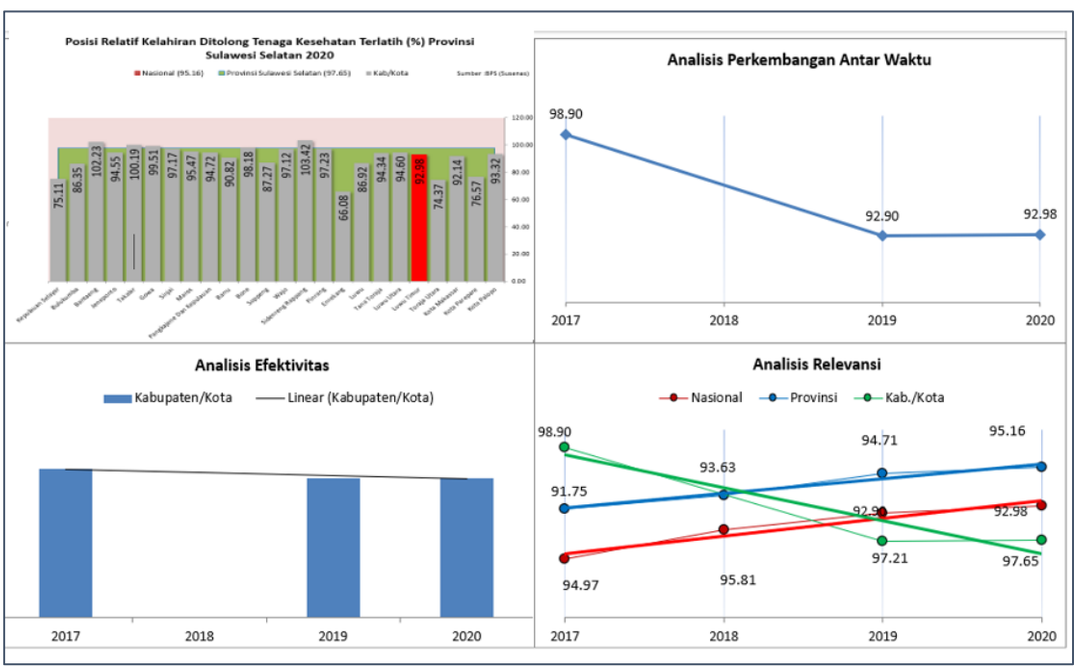

Sumber: Dinkes, BPS diolah

Kondisi Karakteristik Kelahiran ditolong tenaga kesehatan terlatih:

a. Posisi Relatif:

- Pada tahun 2020 Kelahiran ditolong tenaga kesehatan terlatih Provinsi Sulawesi selatan mencapai 92.44%. Pada tingkat kab/kota, terdapat 15 kab/kota termasuk Kabupaten Luwu Timur yang kondisi Kelahiran ditolong tenaga kesehatan terlatih diatas ProvinsiSulawesi selatan. Serta sisanya hanya 9 kab/kota berada di bawah capaian Provinsi.

- Kabupaten Luwu Timur berada pada posisi ke-14 tertinggi di antara 24 kab/kota di Sulawesi Selatan dengan capaian 92.98%. Posisi tertinggi pertama ditempati oleh Kabupaten Sidenreng Rappang dengan capaian 103.42%, dan posisi terendah ditempati oleh Kabupaten Enrekang dengan capaian 60.42%.

b. Perkembangan Antar Waktu:

- Pada Periode tahun 2017-2020, Kelahiran ditolong tenaga kesehatan terlatih Kabupaten Luwu Timur mengalami penurunan dari 98.90% menjadi 92.98%.

c. Efektivitas:

- Pada Periode tahun 2017–2020, Kelahiran ditolong tenaga kesehatan terlatih mengalami tren penurunan yang cenderung fluktuatif. Dari 98.90% menjadi 92.98% di tahun 2020, ini menunjukkan penurunan yang idealnya harus ditingkatkan. Angka penurunannya sebesar 5.92 poin dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Secara umum menggambarkan program penanggulangan kemiskinan yang bertujuan untuk meningktakan Kelahiran ditolong tenaga kesehatan terlatih dinyatakan belum efektif dan masih dibutuhkan kerja keras untuk memaksimalkan capaiannya.

d. Relevansi:

- Tren dan pola perubahan antara capaian Kelahiran ditolong tenaga kesehatan terlatih Kabupaten Luwu Timur dengan capaian Provinsi Sulawesi selatan dapat dikatakan cukup beririgan dimulai pada tahun 2017 hingga Agustus 2020. Sama-sama mengalami penurunan. Jadi dapat dinyatakan jika hubungan keduanya relevan.

2.4.2 Angka Kematian Bayi (AKB) (Per 1000 Kelahiran Hidup)

Gambar 2.19 Analisis Evaluasi Angka Kematian Bayi (AKB) (per 1000 Kelahiran Hidup) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2021

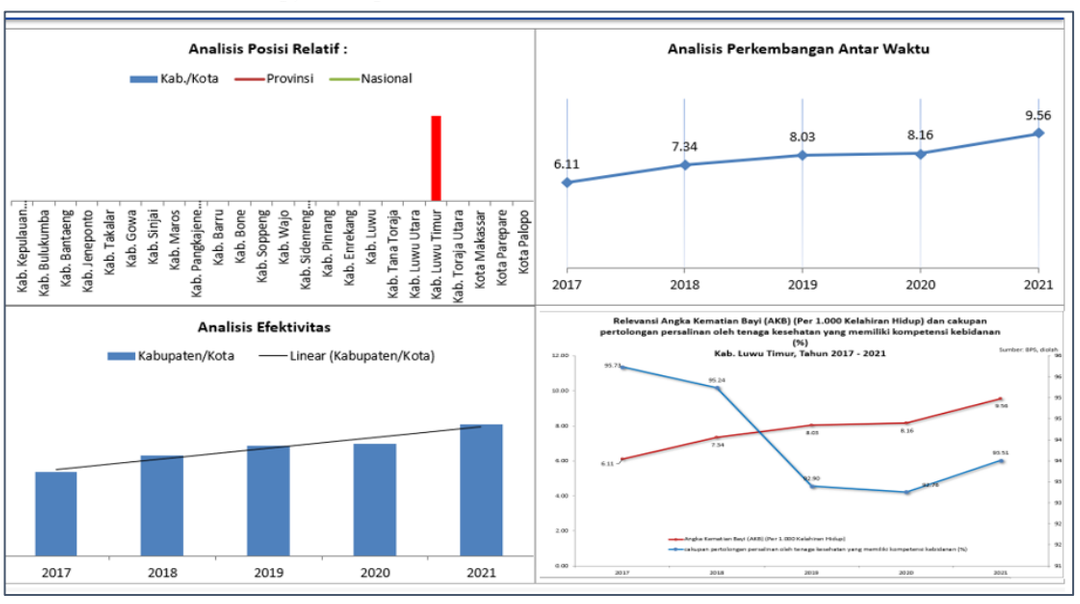

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur, diolah

Kondisi Karakteristik Angka Kematian Bayi (AKB) (Per 1000 Kelahiran Hidup):

a. Perkembangan Antar Waktu:

- Pada Periode tahun 2017-2021, Angka Kematian Bayi (AKB) (Per 1000 Kelahiran Hidup) Kabupaten Luwu Timur mengalami kenaikan yang signifikan setiap tahunnya dari 6.11% menjadi 9.56%.

b. Efektivitas:

- Pada Periode tahun 2017–2021, Angka Kematian Bayi (AKB) (Per 1000 Kelahiran Hidup) mengalami tren kenaikan yang cenderung konsisten setiap tahunnya. Dari 6.11% menjadi 9.56% di tahun 2021, ini menunjukkan kenaikan yang idealnya harus terus diturunkan jumlahnya. Angka kenaikannya sebesar 3.45% dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Secara umum menggambarkan program penanggulangan kemiskinan yang bertujuan untuk menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB) (Per 1000 Kelahiran Hidup) dinyatakan belum efektif dan masih dibutuhkan kerja keras untuk memaksimalkan capaiannya di tahun-tahun mendatang.

c. Relevansi:

- Tren dan pola perubahan antara capaian Angka Kematian Bayi (AKB) (Per 1000 Kelahiran Hidup) Kabupaten Luwu Timur dengan capaian Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan dapat dikatakan cukup relevan dimulai pada tahun 2017 hingga Agustus 2021. Jika terjadi penurunan capaian Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan tentu saja akan mengakibatkan peningkatan capaian pada indikator Angka Kematian Bayi AKB) (Per 1000 Kelahiran Hidup). Jadi dapat dinyatakan jika hubungan keduanya relevan.

2.4.3 Angka Kematian Balita (AKBA) (Per 1000 Kelahiran Hidup)

Gambar 2.20 Analisis Evaluasi Angka Kematian Balita (AKBA) (Per 1000 Kelahiran Hidup) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2021

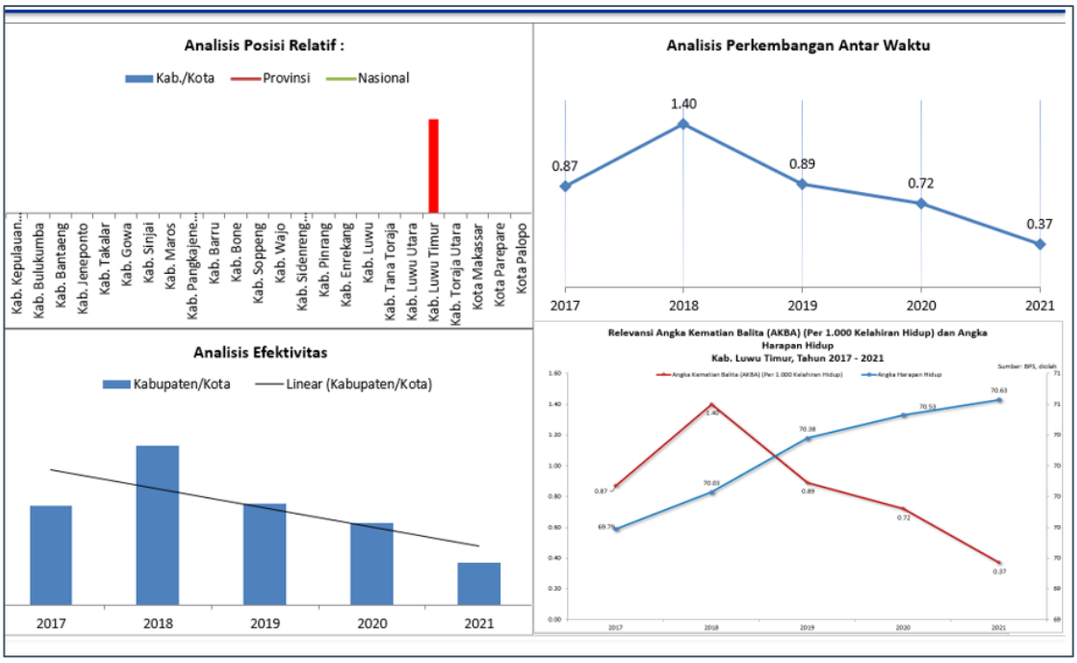

umber: Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur, diolah

Kondisi Karakteristik Angka Kematian Balita (AKBA) (Per 1000 Kelahiran Hidup):

a. Perkembangan Antar Waktu:

- Pada Periode tahun 2017-2021, Angka Kematian Balita (AKBA) (Per 1000 Kelahiran Hidup) Kabupaten Luwu Timur mengalami penurunan dari 0.87% menjadi 0.37%.

b. Efektivitas:

- Pada Periode tahun 2017–2021, Angka Kematian Balita (AKBA) (Per 1000 Kelahiran Hidup) mengalami tren penurunan yang cenderung fluktuatif setiap tahunnya. Dari 0.87% di tahun 2017 meningkat drastis di tahun 2018 menjadi 1.40% lalu kemudian mengalami penurunan di tahun-tahun berikutnya menjadi 0.37% di tahun 2021, ini menunjukkan penurunan yang idealnya memamg harus terus diturunkan jumlah capaiannya. Angka penurunannya sebesar 0.5% dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Secara umum menggambarkan program penanggulangan kemiskinan yang bertujuan untuk menurunkan Angka Kematian Balita (AKBA) (Per 1000 Kelahiran Hidup) dinyatakan sudah efektiv namun masih dibutuhkan kerja keras untuk memaksimalkan capaiannya.

c. Relevansi:

- Tren dan pola perubahan antara capaian Angka Kematian Balita (AKBA) (Per 1000 Kelahiran Hidup) Kabupaten Luwu Timur dengan capaian Angka Harapan Hidup dapat dikatakan cukup relevan dimulai pada tahun 2017 hingga Agustus 2020. Jika terjadi penurunan capaian Angka Kematian Balita (AKBA)

(Per 1000 Kelahiran Hidup) tentu saja akan mengakibatkan peningkatan capaian pada indikator Angka Harapan Hidup. Jadi dapat dinyatakan jika hubungan keduanya relevan.

2.4.4 Angka Kematian Ibu (Per 100.000 Kelahiran Hidup)

Gambar 2.21 Analisis Evaluasi Angka Kematian Ibu (Per 100.000 Kelahiran Hidup) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2020

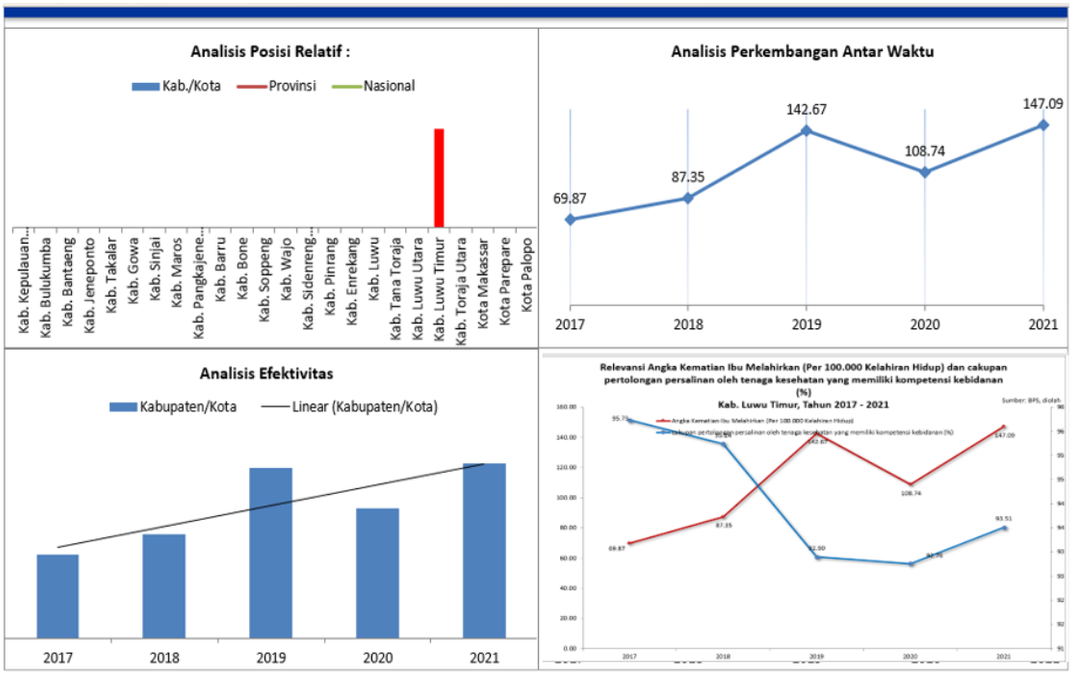

Sumber: Dinkes, BPS diolah

Kondisi Karakteristik Angka Kematian Ibu Melahirkan (Per 100.000 Kelahiran Hidup):

a. Perkembangan Antar Waktu:

- Pada Periode tahun 2017-2021, Angka Kematian Ibu Melahirkan (Per 100.000 Kelahiran Hidup) Kabupaten Luwu Timur mengalami peningkatan dari 69.87% menjadi 147.09%.

b. Efektivitas:

- Pada Periode tahun 2017–2021, Angka Kematian Ibu Melahirkan (Per 100.000 Kelahiran Hidup) mengalami tren peningkatan yang fluktuatif setiap tahunnya. Dari 69.87% menjadi 142.67% di tahun 2019 kemudian menurun di tahun 2020 menjadi 108.74% dan mengalami peningatan drastis di tahun 2021 menjadi 147.09%. Ini menunjukkan angka peningkatan yang idealnya harus terus diturunkan jumlahnya setiap tahunnya. Angka kenaikannya sebesar 77.22% dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Secara umum menggambarkan program penanggulangan kemiskinan yang bertujuan untuk menurunkan Angka Kematian Ibu Melahirkan (Per 100.000 Kelahiran Hidup) dinyatakan sangat tidak efektif dan pastinya masih dibutuhkan kerja keras untuk memaksimalkan capaiannya.

c. Relevansi:

- Tren dan pola perubahan antara capaian Angka Kematian Ibu Melahirkan (Per 100.000 Kelahiran Hidup) Kabupaten Luwu Timur dengan Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan dapat dikatakan cukup relevan dimulai pada tahun 2017 hingga tahun 2021. Jika terjadi penurunan capaian Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan tentu saja akan mengakibatkan peningkatan capaian pada indikator Angka Kematian Ibu Melahirkan (Per 100.000 Kelahiran Hidup). Jadi dapat dinyatakan jika hubungan keduanya relevan.

2.4.5 Rasio Dokter Per satuan Penduduk

Gambar 2.22 Analisis Evaluasi Rasio Dokter Per satuan Penduduk Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2021

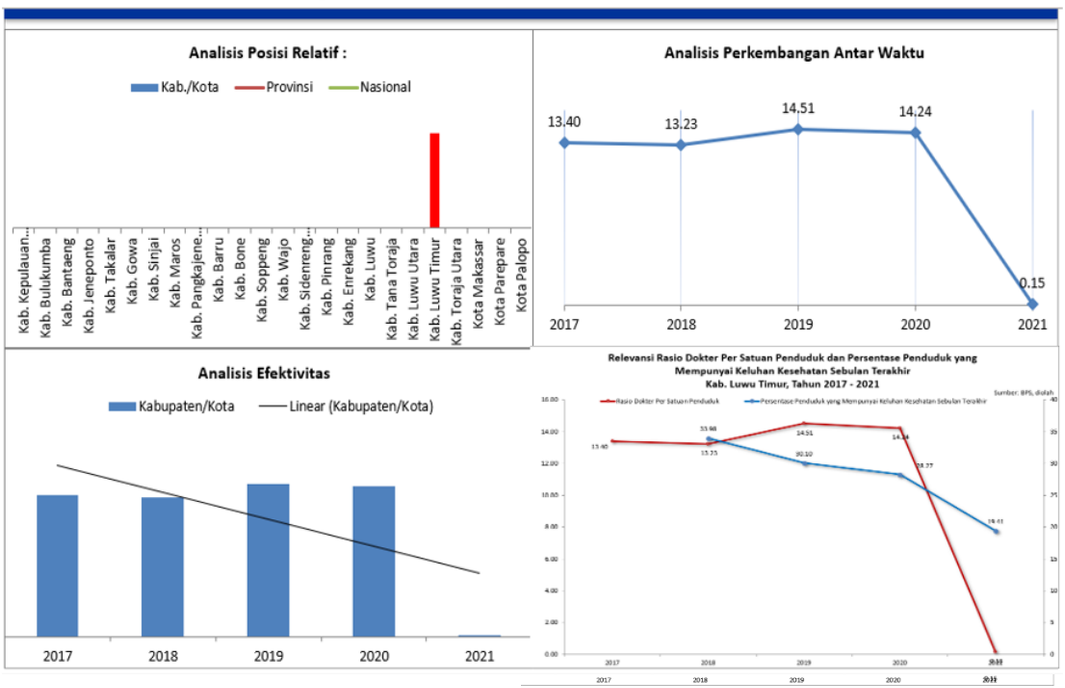

Sumber: Dinkes, BPS diolah

Kondisi Karakteristik Rasio Dokter Per Satuan Penduduk:

a. Perkembangan Antar Waktu:

- Pada Periode tahun 2017-2021, Rasio Dokter Per Satuan Penduduk Kabupaten Luwu Timur mengalami penurunan secara fluktuatif dari 13.40% menjadi 0.15%. Walaupun pernah mengalami peningkatan drastis di tahun 2018 sebanyak 14.51%, tetapi kemudian menurun di tahun-tahun berikutnya sampai tahun 2021.

b. Efektivitas:

- Pada Periode tahun 2017–2021, Rasio Dokter Per Satuan Penduduk mengalami tren penurunan drastis yang cenderung fluktuatif setiap tahunnya. Dari 13.40% menjadi 0.15% di tahun 2021, ini menunjukkan angka penurunan yang idealnya

harus terus ditingkatkan jumlahnya. Angka penurunannya sangat besar yaitu 13.25% dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Secara umum menggambarkan program penanggulangan kemiskinan yang bertujuan untuk meningkatkan layanan Kesehatan dengan cara peningkatan Rasio Dokter Per Satuan Penduduk dinyatakan belum efektif dan pastinya masih dibutuhkan kerja keras untuk memaksimalkan capaiannya.

c. Relevansi:

- Tren dan pola perubahan antara capaian Rasio Dokter Per Satuan Penduduk Kabupaten Luwu Timur dengan capaian Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Sebulan Terakhir dapat dikatakan tidak relevan dimulai pada tahun 2018 hingga Agustus 2020. Jika terjadi penurunan capaian Rasio Dokter Per Satuan Penduduk harusnya akan mengakibatkan lonjakan capaian pada indikator Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Sebulan Terakhir. Tetapi pada kenyataannya malah terjadi penurunan jumlah penduduk yang mempunyai keluhan Kesehatan sebulan terakhir. Jadi dapat dinyatakan jika hubungan keduanya tidak relevan.

2.4.6 Penduduk Yang Menderita Sakit Sebulan Terakhir

Gambar 2.23 Analisis Evaluasi Penduduk Yang Menderita Sakit Sebulan Terakhir Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2021

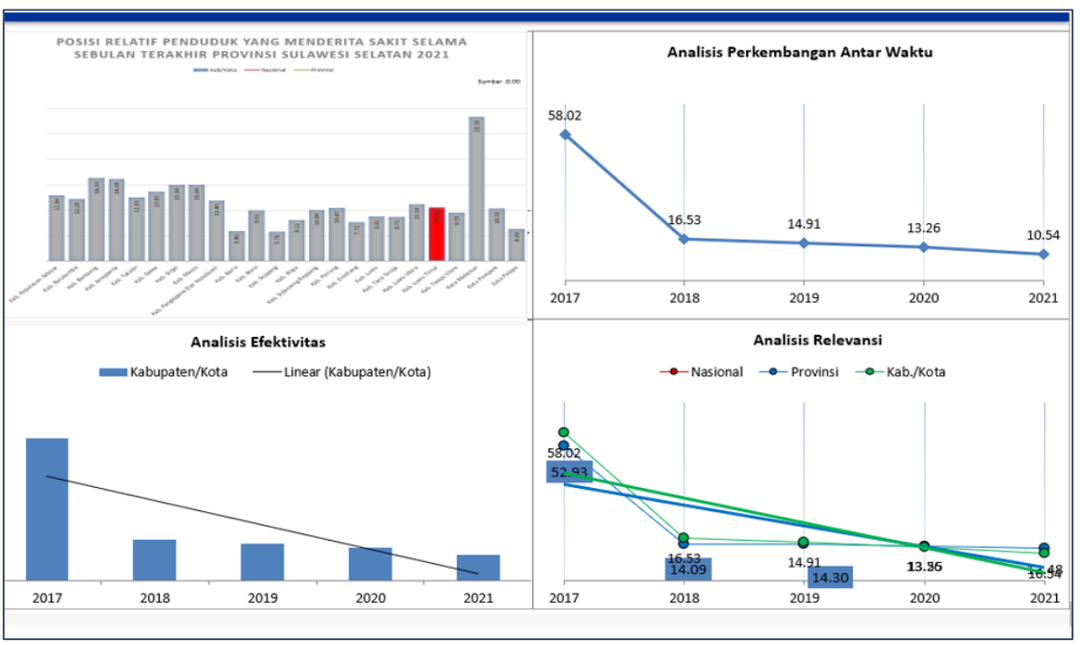

Sumber: Dinkes, BPS diolah

Kondisi Karakteristik Penduduk yang Menderita Sakit Selama Sebulan Terakhir:

a. Perkembangan Antar Waktu:

- Pada Periode tahun 2017-2021, Penduduk yang Menderita Sakit Selama Sebulan Terakhir Kabupaten Luwu Timur mengalami penurunan drastis dari

58.02% menjadi 10.54%

b. Efektivitas:

- Pada Periode tahun 2017–2021, Penduduk yang Menderita Sakit Selama Sebulan Terakhir mengalami tren penurunan. Dari 58.02% menjadi 10.54% di tahun 2021, ini menunjukkan angka penurunan yang idealnya memang harus terus diturunkan jumlahnya. Angka penurunannya sebesar 47,48% dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Secara umum menggambarkan program penanggulangan kemiskinan yang bertujuan untuk menurunkan jumlah Penduduk yang Menderita Sakit Selama Sebulan Terakhir dinyatakan sudah efektiv namun masih dibutuhkan upaya lebih lagi untuk memaksimalkan capaiannya.

c. Relevansi:

- Tren dan pola perubahan antara capaian Penduduk yang Menderita Sakit Selama Sebulan Terakhir Kabupaten Luwu Timur dengan capaian Penduduk yang Mempunyai Keluhan Sakit Sebulan Terakhir dapat dikatakan cukup relevan dimulai pada tahun 2018 hingga Agustus 2021. Jika terjadi penurunan capaian Penduduk yang Mempunyai Keluhan Sakit Sebulan Terakhir tentu saja akan mengakibatkan penurunan angka capaian pada indikator Penduduk yang Menderita Sakit Selama Sebulan Terakhir. Dengan kata lain semakin berkurang Penduduk yang Mempunyai Keluhan Sakit Sebulan Terakhir maka akan mengakibatkan mereka peduli pada kesehatannya dan implikasinya adalah berkurangnya jumlah penduduk yang menderita sakit. Jadi dapat dinyatakan jika hubungan keduanya relevan.

2.5 Bidang Infrastruktur Dasar

2.5.1 Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak

Gambar 2.24 Analisis Evaluasi Proporsi Rumah Tangga Dengan Sanitasi Layak Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2021

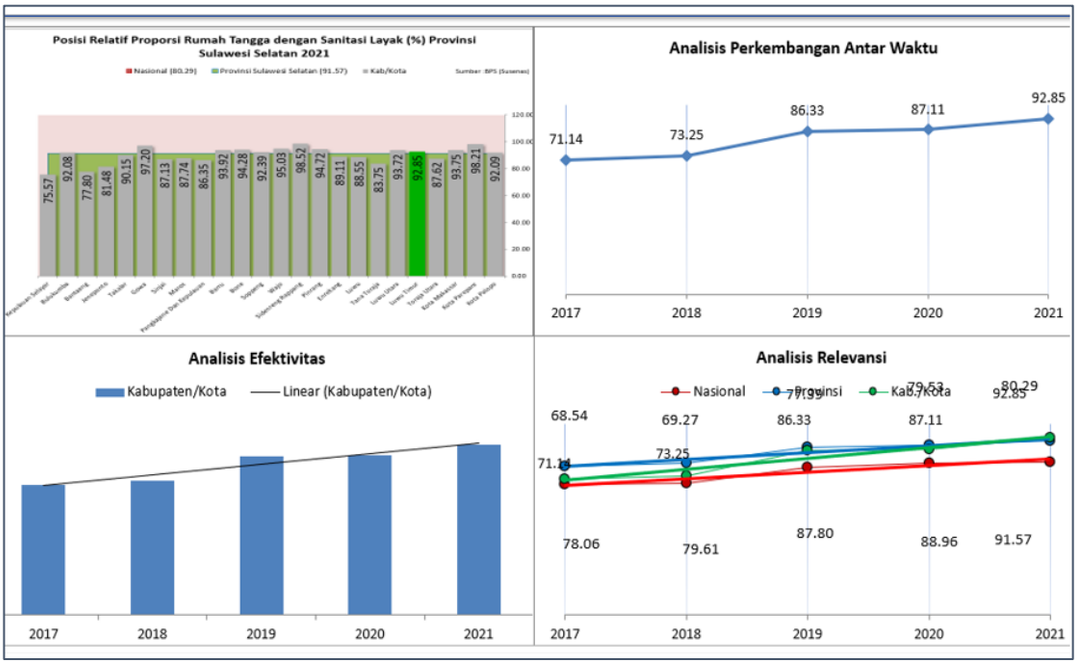

Sumber: BPS diolah

Kondisi Karakteristik Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak :

a. Posisi Relatif:

- Pada tahun 2021 Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak Provinsi Sulawesi selatan mencapai 91.57% lebih tinggi dari Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak Nasional (80.29%). Pada tingkat kab/kota, terdapat 22 kab/kota termasuk Kabupaten Luwu Timur yang kondisi Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak-nya diatas Provinsi Sulawesi selatan dan Nasional. Dan hanya 2 kab/kota berada di bawah Nasional dan di bawah capaian Provinsi.
- Kabupaten Luwu Timur menempati posisi ke-10 tertinggi di antara 24 kab/kota se-Sulawesi Selatan dengan capaian 92.85%. Posisi tertinggi pertama ditempati oleh Kabupaten Sidenreng Rappang dengan capaian 98.52%, dan posisi terendah ditempati oleh Kabupaten Kepulauan Selayar dengan capaian 75.57%.

b. Perkembangan Antar Waktu:

- Pada Periode tahun 2018-2021, Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak Kabupaten Luwu Timur mengalami peningkatan dari 73.26% menjadi 92.85%.

c. Efektivitas:

- Pada Periode tahun 2018–2021, Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak mengalami tren peningkatan yang cenderung konsisten setiap tahunnya. Dari 73.26% menjadi 92.85% di tahun 2021, ini menunjukkan peningkatan yang belum

maksimal. Hanya naik sebesar 19.59 poin dalam kurun waktu 4 tahun terakhir. Secara umum menggambarkan program penanggulangan kemiskinan yang bertujuan untuk meningkatkan capaian Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak dinyatakan sudah efektif namun masih dibutuhkan kerja keras untuk memaksimalkan capaiannya.

d. Relevansi:

- Tren dan pola perubahan antara capaian Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak Kabupaten Luwu Timur dengan Provinsi Sulawesi selatan dan capaian Nasional dapat dikatakan cukup beriringan dimulai pada tahun 2018 hingga Agustus 2021. Jadi dapat dinyatakan jika hubungan ketiganya relevan.

2.5.2 Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak

Gambar 2.25 Analisis Evaluasi Proporsi Rumah Tangga Dengan Air Minum Layak Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018-2022

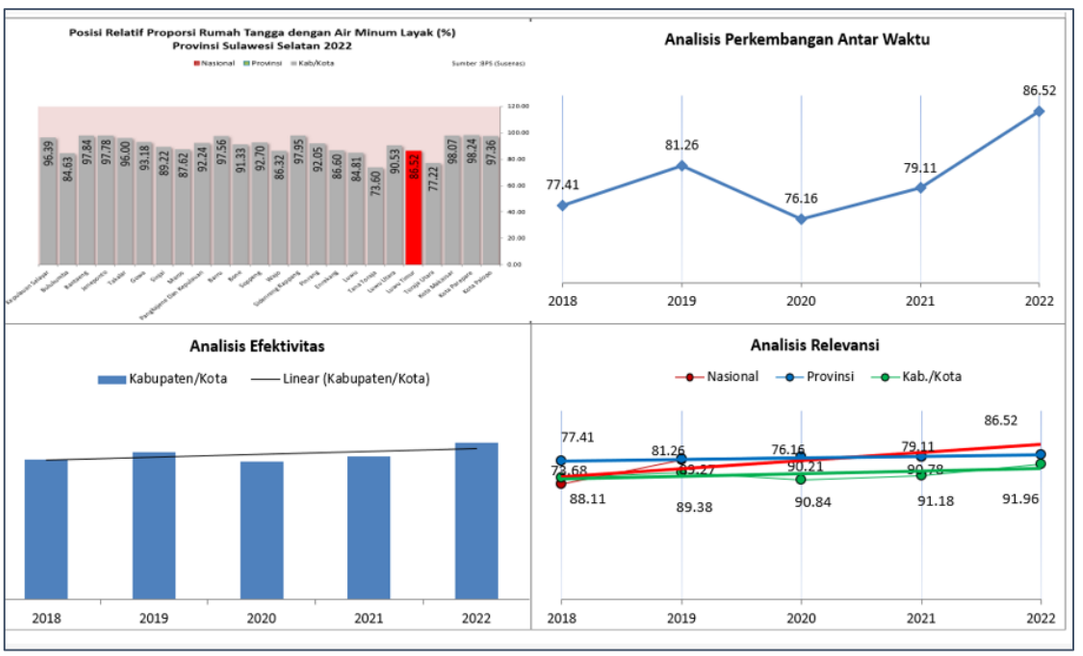

Sumber: BPS diolah

Kondisi Karakteristik Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak :

a. Posisi Relatif:

- Pada tahun 2022 Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak Provinsi Sulawesi selatan mencapai 91.96%. Pada tingkat kab/kota, terdapat 13 kab/kota yang kondisi Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak -nya diatas ProvinsiSulawesi selatan. Dan 11 kab/kota termasuk Kabupaten Luwu Timur berada di bawah capaian Provinsi.

b. Perkembangan Antar Waktu:

- Pada Periode tahun 2018-2022, Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak Kabupaten Luwu Timur mengalami peningkatan dari 77.41% menjadi 86.52%.

c. Efektivitas:

- Pada Periode tahun 2018–2022, Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak mengalami tren peningkatan yang cenderung fluktuatif setiap tahunnya. Dari 77.41% di tahun 2018 menjadi 81.26% di tahun 2019, menurun di tahun 2020 menjadi 76.16% dan mengalami peningkatan lagi di tahun 2021 menjadi 79.11%, begitu pula di tahun 2022 menjadi 86.53%. Secara umum menggambarkan program penanggulangan kemiskinan yang bertujuan untuk meningkatkan capaian Proporsi Rumah Tangga dengan Air Mnum Layak dinyatakan sudah efektif namun masih dibutuhkan kerja keras untuk memaksimalkan capaiannya.

d. Relevansi:

- Tren dan pola perubahan antara capaian Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak Kabupaten Luwu Timur dengan Provinsi Sulawesi selatan dan capaian Nasional dapat dikatakan cukup beriringan dimulai pada tahun 2018 hingga Agustus 2022. Jadi dapat dinyatakan jika hubungan ketiganya relevan.

2.5.3 Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Listrik

Gambar 2.26 Analisis Evaluasi Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Listrik Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2022

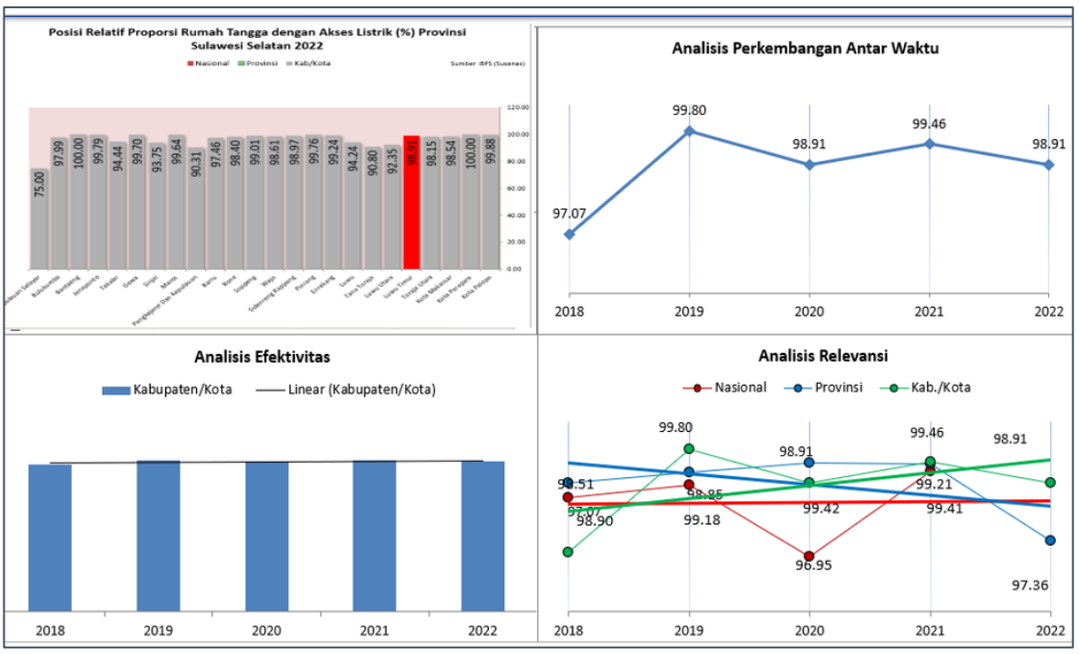

Sumber: BPS diolah

Kondisi Karakteristik Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Listrik :

a. Posisi Relatif:

- Pada tahun 2022 Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Listrik Provinsi Sulawesi selatan mencapai 97.36%. Pada tingkat kab/kota, terdapat 17 kab/kota termasuk Kabupaten Luwu Timur yang kondisi Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Listrik-nya diatas ProvinsiSulawesi selatan. Dan hanya 7 kab/kota berada di bawah capaian Provinsi.

- Kabupaten Luwu Timur berada pada posisi ke-10 tertinggi di antara 24 kab/kota se-Sulawesi Selatan dengan capaian 98.01%. Posisi tertinggi ditempati oleh Kabupaten Bantaeng dan Kota Pare-pare dengan capaian 100%. Dan Posisi terendah ditempati Kabupaten Kepulauan Selayar dengan capaian 75%.

b. Perkembangan Antar Waktu:

- Pada Periode tahun 2018-2022, Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Listrik Kabupaten Luwu Timur mengalami peningkatan dari 97.07% menjadi 98.01%.

c. Efektivitas:

- Pada Periode tahun 2018–2022, Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Listrik mengalami tren peningkatan yang cenderung fluktuatif setiap tahunnya. Dari 97.07% di tahun 2018 menjadi 99.80% di tahun 2019, kemudian menurun menjadi 98.91% di tahun 2020 dan meningkat lagi di tahun 2021 menjadi 99.46% kemudian menurun lagi di tahun 2022 menjadi 98.01%. Ini menunjukkan peningkatan yang belum maksimal. Namun secara umum menggambarkan program penanggulangan kemiskinan yang bertujuan untuk meningkatkan capaian Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Listrik dinyatakan sudah efektiv namun masih dibutuhkan kerja keras untuk memaksimalkan capaiannya.

d. Relevansi:

- Tren dan pola perubahan antara capaian Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Listrik Kabupaten Luwu Timur dengan Provinsi Sulawesi selatan dan capaian Nasional dapat dikatakan cukup beriringan dimulai pada tahun 2018 hingga Agustus 2022. Jadi dapat dinyatakan jika hubungan ketiganya relevan.

2.6 Bidang Ketahanan Pangan

2.6.1 Perkembangan Harga Beras

Gambar 2.27 Analisis Evaluasi Perkembangan Harga Beras Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021

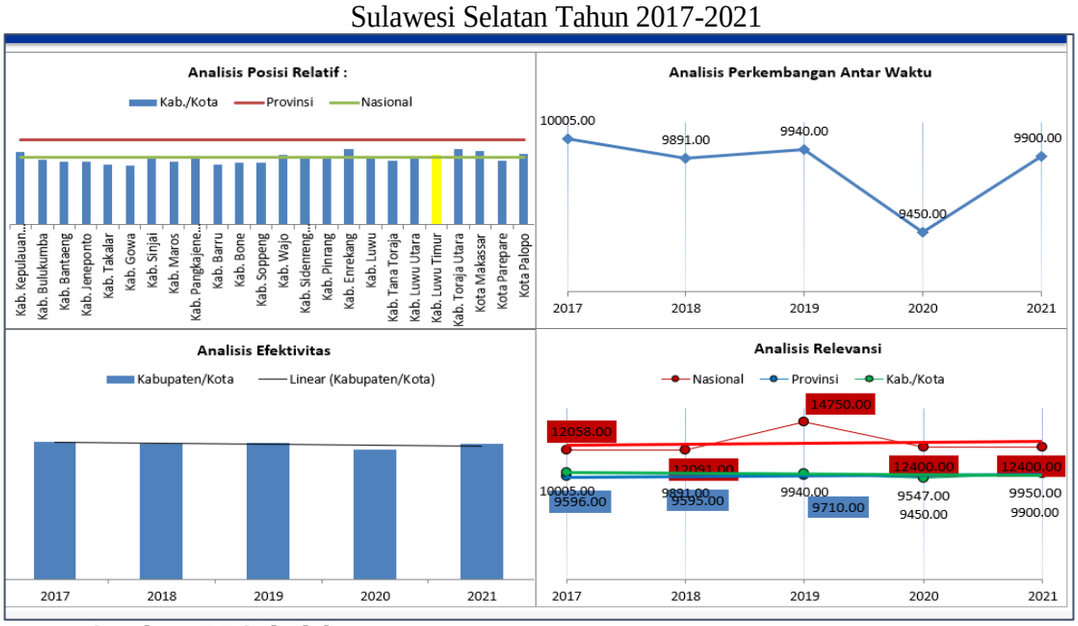

Sumber: BPS diolah

Kondisi Karakteristik Perkembangan Harga Beras:

a. Posisi Relatif:

- Pada tahun 2021 Perkembangan Harga Beras Provinsi Sulawesi selatan mencapai Rp 9.950,- lebih rendah dari Perkembangan Harga Beras Nasional (Rp 12.400,-). Pada tingkat kab/kota, terdapat 24 atau semua kab/kota termasuk Kabupaten Luwu Timur yang kondisi Perkembangan Harga Beras-nya di bawah ProvinsiSulawesi selatan dan Nasional.

b. Perkembangan Antar Waktu:

- Pada Periode tahun 2017-2021, Perkembangan Harga Beras Kabupaten Luwu Timur mengalami penurunan yang tidak terlalu berbeda setiap tahunnya. Dari Rp 10.005,- menjadi Rp 9.900,-

c. Efektivitas:

- Pada Periode tahun 2017–2021, Perkembangan Harga Beras mengalami tren penurunan yang cenderung fluktuatif setiap tahunnya. Dari Rp 10.005,- menjadi Rp 9.900,- di tahun 2021, ini menunjukkan harga yang stabil setiap tahunnya dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Secara umum menggambarkan program penanggulangan kemiskinan yang bertujuan untuk menjaga kestabilan Perkembangan Harga Beras dinyatakan sudah efektiv.

d. Relevansi:

- Tren dan pola perubahan antara capaian Perkembangan Harga Beras Kabupaten Luwu Timur dengan Provinsi Sulawesi selatan dan capaian Nasional dapat dikatakan cukup beriringan dimulai pada tahun 2017 hingga Agustus 2021. Jadi dapat dinyatakan jika hubungan ketiganya relevan.

2.6.2 Persentase Rumah Tangga Penerima Program Raskin/BPNT

Gambar 2.28 Analisis Evaluasi Persentase Rumah Tangga Penerima Program Raskin/BPNT Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2021

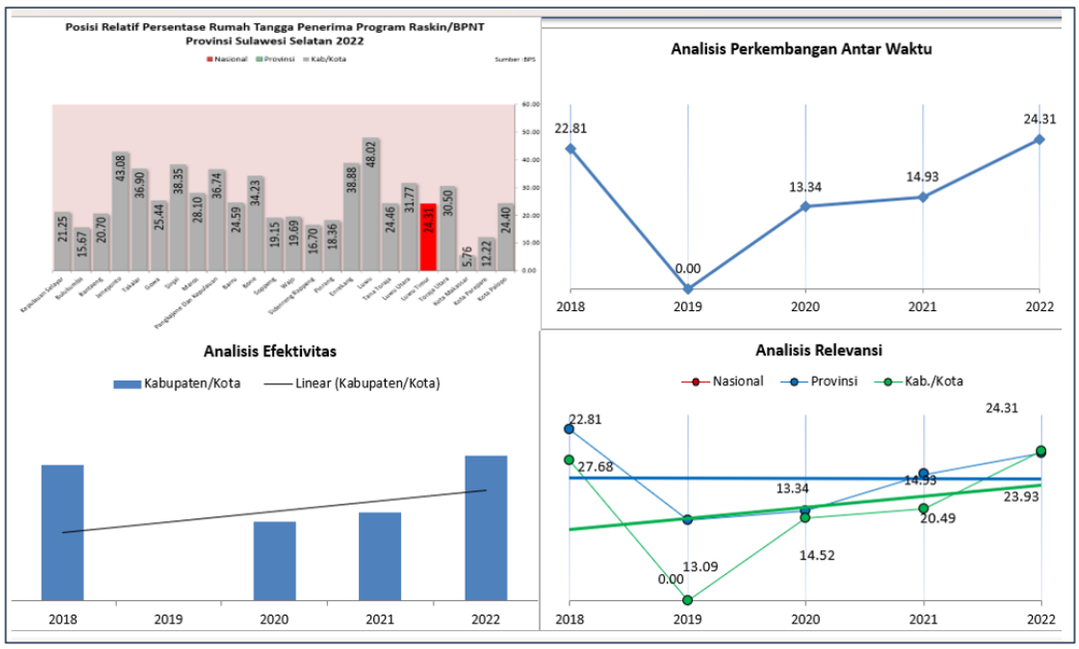

Sumber: BPS diolah

Kondisi Karakteristik Rumah Tangga Penerima Program Raskin/BPNT:

a. Posisi Relatif:

- Pada tahun 2022 Rumah Tangga Penerima Program Raskin/BPNT Provinsi Sulawesi selatan mencapai 23.93%. Pada tingkat kab/kota, terdapat 9 kab/kota yang kondisi Rumah Tangga Penerima Program Raskin/BPNT diatas Provinsi Sulawesi selatan. Dan sisanya 15 kab/kota termasuk Kabupaten Luwu Timur berada di bawah capaian Provinsi.
- Kabupaten Luwu Timur berada pada posisi ke-10 terendah di antara 24 kab/kota se-Sulawesi Selatan dengan capaian 24.31%. Posisi pertama tertinggi ditempati oleh Kabupaten Luwu dengan capaian 48.02% dan Posisi terendah ditempati oleh Kota Makassar dengan capaian 5.76%.

b. Perkembangan Antar Waktu:

- Pada Periode tahun 2018-2022, Rumah Tangga Penerima Program Raskin/BPNT Kabupaten Luwu Timur mengalami peningkatan dari 22.81% menjadi 24.31%.

c. Efektivitas:

- Pada Periode tahun 2018–2022, Rumah Tangga Penerima Program Raskin/BPNT mengalami tren peningkatan yang fluktuatif. Dari 22.81% menjadi 24.31% di tahun 2022. Secara umum menggambarkan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran rumah Tangga Miskin salah satunya dengan pemberian Program Raskin/BPNT dinyatakan sudah efektif dan masih dibutuhkan kerja keras untuk memaksimalkan

capaiannya. Semakin banyak Rumah tangga miskin yang bisa terjangkau oleh program Raskin/BPNT makan akan membantu penurunan tingkat kemiskinan.

d. Relevansi:

- Tren dan pola perubahan antara capaian Rumah Tangga Penerima Program Raskin/BPNT Kabupaten Luwu Timur dengan Provinsi Sulawesi selatan dapat dikatakan cukup beriringan dimulai pada tahun 2018 hingga tahun 2022. Jadi dapat dinyatakan jika hubungan keduanya relevan.

2.6.3 Perkembangan harga Bahan Pokok Utama

Tabel 2.1 Perkembangan Harga Bahan Pokok Utama Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020-2022

No.	Komoditas(Rp)	2020	2021	2022
I	**Beras**			
1	Beras Kualitas Medium (kg)			
2	Beras Kualitas Premium (kg)			
II	**Daging Ayam**			
1	Daging Ayam Ras Segar (kg)			
III	**Daging Sapi**			
1	Daging Sapi (kg)			
IV	**Telur Ayam**			
1	Telur Ayam Ras Segar (kg)			
V	**Bawang Merah**			
1	Bawang Merah (kg)			
VI	**Bawang Putih**			
1	Bawang Putih (kg)			
VII	**Cabai Merah**			
1	Cabai Merah Keriting (kg)			
VIII	**Cabai Rawit**			
1	Cabai Rawit Merah (kg)			
IX	**Minyak Goreng**			
1	Minyak Goreng Curah (kg)			
X	**Gula Pasir**			
1	Gula Pasir (kg)			

Jika melihat data dalam Tabel 2.1 di atas dapat disimpulkan bahwa perkembangan harga 10 Bahan pokok utama di Kabupaten Luwu Timur di tiga tahun terakhir pada umumnya masih stabil. Hanya ada .. bahan pokok utama yang menunjukkan harga kenaikan yaitu: ……. beberapa bahan pokok utama ini memang diketahui harganya selalu dipengaruhi oleh kondisi ketersediaannya di peternak ataupun petani. Tetapi jika dilihat kondisi ketersediaan semua bahan pokok utama, bisa dipastikan stabilitas harganya masih berlanjut di tahun berikutnya. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah untuk mendukung stabilitas harga bahan pokok

utama cukup efektiv. Jika kondisinya tetap stabil dan tidak ada lonjakan harga maka bisa dipastikan bisa menekan beban pengeluaran rumah tangga miskin yang tentu saja berimplikasi pada penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Luwu Timur.

Profil kemiskinan daerah Provinsi Sulawesi selatan dapat disimpulkan dalam tabel 2.2 berikut ini:

Tabel 2.2 Profil Kemiskinan Provinsi Sulsel Tahun 2017-2022

No	Indikator	Analisis						
		Perkembangan Antar Waktu		Posisi Relatif	Analisis Efektivitas		Analisis Relevansi	
		Awal	Akhir	Perbandingan dengan Capaian Nasional	Efektif	Tidak Efektif	Capaian Nasional	Capaian antar Indikator
I	**Bidang Konsumsi Pengeluaran**							
1	Persentase Penduduk Miskin	7.66%	6.81%	Lebih Rendah dari Capaian Provinsi dan Nasional	√	(-)	Relevan	(-)
2	Indeks Kedalaman Kemiskinan	1.60%	0.80%	Lebih Rendah dari Capaian Provinsi dan Nasional	√	(-)	Relevan	(-)
3	Indeks Keparahan Kemiskinan	0.50%	0.16%	Lebih Rendah dari Capaian Provinsi dan Nasional	√	(-)	Relevan	(-)
4	Jumlah Penduduk Miskin	21940 jiwa	20890 jiwa	Lebih Rendah dari Capaian Provinsi dan Nasional	√	(-)	(-)	Relevan dengan Persentase Penduduk Miskin
5	Garis Kemiskinan	Rp 289.214,-	Rp 394.158,-	Lebih Rendah dari Capaian Provinsi dan Nasional	(-)	√	Relevan	(-)
6	Persentase Penduduk Miskin Ekstrem	2.58%	0.45%	Lebih Rendah dari Capaian Provinsi dan	√	(-)	Relevan	(-)

				Nasional				
7	Tingkat Ketimpangan Pengeluaran (Gini Rasio)	0.40%	0.39%	Lebih Tinggi dari Capaian Provinsi dan Nasional	√	(-)	Relevan	(-)
II	**Bidang Ketenagakerjaan**							
1	Angkatan kerja	138367 jiwa	161470 jiwa	Lebih Rendah dari Capaian Provinsi dan Nasional	√	(-)	(-)	Relevan dengan Persentase Penduduk Miskin
2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	70.03%	71.51%	Lebih Tinggi dari Capaian Provinsi dan Nasional	(-)	√	Relevan	(-)
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	2.58%	2.18%	Lebih Rendah dari Capaian Provinsi dan Nasional	√	(-)	Relevan	(-)
III	**Bidang Pendidikan**							
1	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	109.75%	107.92%	Lebih Tinggi dari Capaian Provinsi dan Nasional	(-)	√	Relevan	(-)
2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	86.90%	87.20%	Lebih Tinggi dari Capaian Provinsi dan Nasional	√	(-)	Relevan	(-)
3	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	99.31%	98.28%	Lebih Tinggi dari Capaian Provinsi dan Nasional	(-)	√	Tidak Relevan	(-)
4	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	77.93%	78.81%	Lebih Tinggi dari Capaian Provinsi dan Lebih	√	(-)	Relevan	(-)

				Rendah Dari Nasional				
5	Harapan Lama Sekolah	12.79 tahun	13 tahun	Lebih Rendah dari Capaian Provinsi dan Nasional	√	(-)	Relevan	(-)
6	Angka Buta Huruf Penduduk 15+	5.20%	6.41%	Lebih Rendah Dari Provinsi dan Lebih Tinggi dari Nasional	(-)	√	Tidak Relevan	(-)
7	Persentase Penduduk Usia 7-24 Tahun Yang Tidak Bersekolah Lagi	26,07%	26,71%	Lebih Tinggi dari Provinsi Tidak tersedia data Nasional	(-)	√	Relevan	(-)
IV	**Bidang Kesehatan**							
1	Kelahiran Ditolong Tenaga Kesehatan Terlatih	98.90%	92.98%	Lebih Tinggi dari Provinsi Tidak tersedia data Nasional	(-)	√	Relevan	(-)
2	Angka Kematian Bayi (Per 1000 kelahiran Hidup)	6.11%	9.56%	Tidak tersedia data Provinsi dan Nasional	(-)	√	(-)	Relevan dengan Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan
3	Angka Kematian Balita (Per 1000 kelahiran Hidup)	0.87%	0.37%	Tidak tersedia data Provinsi dan Nasional	√	(-)	(-)	Relevan dengan Angka Harapan Hidup
4	Angka Kematian Ibu (Per 100.000 kelahiran Hidup)	69.87%	147.09%	Tidak tersedia data Provinsi dan Nasional	(-)	√	(-)	Relevan dengan Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan
5	Rasio Dokter per Satuan Penduduk	13.40%	0.15%	Tidak tersedia data Provinsi	(-)	√	(-)	Tidak Relevan dengan Penduduk

				dan Nasional				yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Sebulan Terakhir
6	Penduduk Yang Menderita Sakit Sebulan Terakhir	58.02%	10.54%	Tidak tersedia data Provinsi dan Nasional	√	(-)	(-)	Relevan dengan Penduduk yang Mempunyai Keluhan Sakit Sebulan Terakhir
V	**Bidang Infrastruktur Dasar**							
1	Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak	73.26%	92.85%	Lebih Tinggi dari Capaian Provinsi dan Nasional	√	(-)	Relevan	(-)
2	Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak	77.41%	86.52%	Lebih Rendah dari Capaian Provinsi dan Nasional	√	(-)	Relevan	(-)
3	Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Listrik	97.07%	98.01%	Lebih Tinggi dari Capaian Provinsi dan Nasional	√	(-)	Relevan	(-)
VI	**Bidang Ketahanan Pangan**							
1	Perkembangan Harga Beras	Rp 10.005,-	Rp 9.900,-	Lebih Rendah dari Capaian Provinsi dan Nasional	√	(-)	Relevan	(-)
2	Persentase Rumah Tangga yang Menerima Program Raskin/BPNT	22.81%	24.31%	Lebih Rendah dari Capaian Provinsi dan Nasional	(-)	√	Relevan	(-)
3	Perkembangan Harga Bahan Pokok	Stabil	Stabil	Tidak tersedia data Nasional	√	(-)	(-)	(-)

2.7 Poverty Brief Tahun 2022

Ringkasan Kemiskinan/Poverty Brief adalah rangkuman dari berbagi indikator terpilih dan dilengkapi dengan narasi sesuai dengan hasil analisi indikator tersebut.

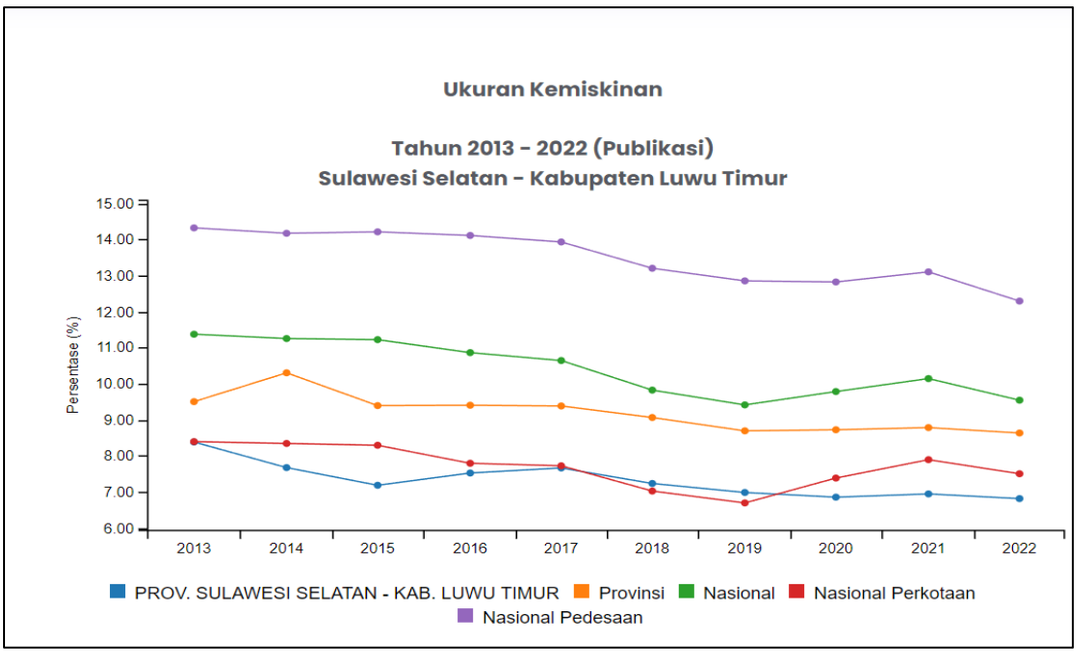

Tingkat kemiskinan PROV. SULAWESI SELATAN - KAB. LUWU TIMUR pada tahun 2022 adalah sebesar 6.81%. Nilai ini menunjukkan penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 0.13%. Lebih dari itu, tingkat penurunan kemiskinan di tahun 2022 lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Tingkat kemiskinan PROV. SULAWESI SELATAN - KAB. LUWU TIMUR tahun 2022 dibawah tingkat kemiskinan nasional. Sebagai daerah yang didominasi daerah perdesaan, tingkat kemiskinan PROV. SULAWESI SELATAN - KAB. LUWU TIMUR sudah lebih rendah dibandingkan tingkat kemiskinan Nasional khusus daerah perdesaan.

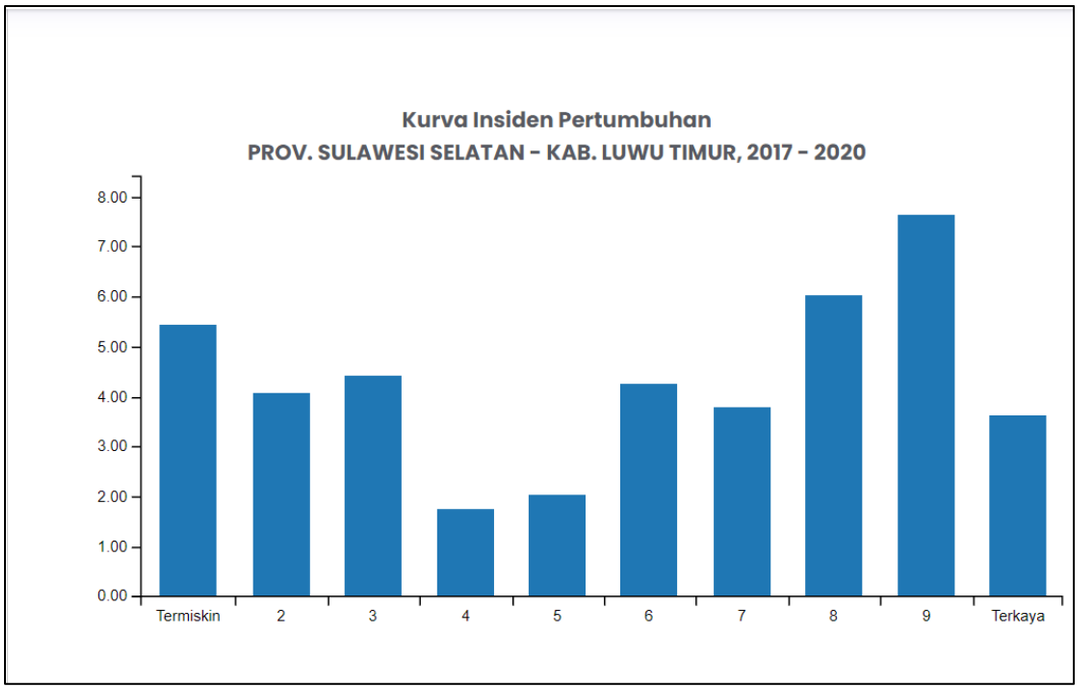

Secara rata-rata, pengeluaran per kapita penduduk PROV. SULAWESI SELATAN - KAB. LUWU TIMUR dari tahun 2017 ke tahun 2020 tumbuh sebesar 4.3000 %. Akan tetapi, jika ditelusuri lebih dalam 36.1170 % penduduk PROV. SULAWESI SELATAN - KAB. LUWU TIMUR tumbuh di bawah rata-rata. Pertumbuhan pengeluaran per kapita penduduk berpendapatan rendah lebih cepat dibandingkan penduduk berpendapatan tinggi, di mana penduduk 10% termiskin (desil 1) tumbuh sebesar 5.4316 %, sementara penduduk 10% terkaya [desil 10] tumbuh sebesar 3.6117 %.

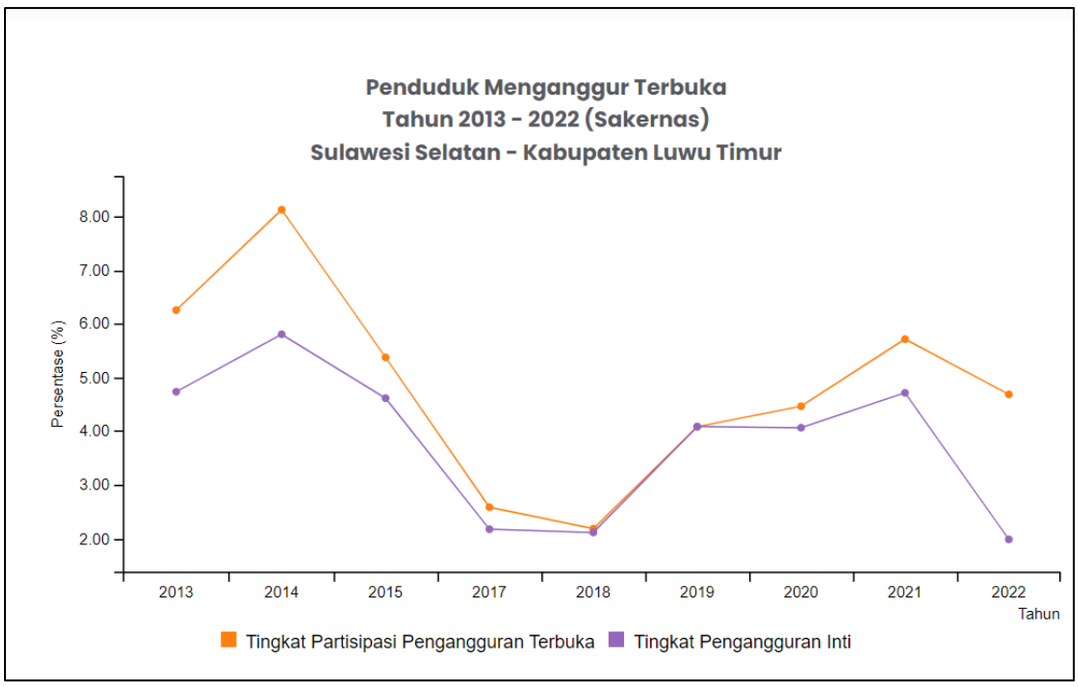

Tingkat pengangguran terbuka PROV. SULAWESI SELATAN - KAB. LUWU TIMUR pada tahun 2022 adalah sebesar 4.68%. Nilai ini menunjukkan penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 1.03%, yang artinya jumlah penganggur terbuka berkurang sejumlah 126,732 orang. Lebih dari itu, tingkat penurunan pengangguran terbuka di tahun 2022 lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.

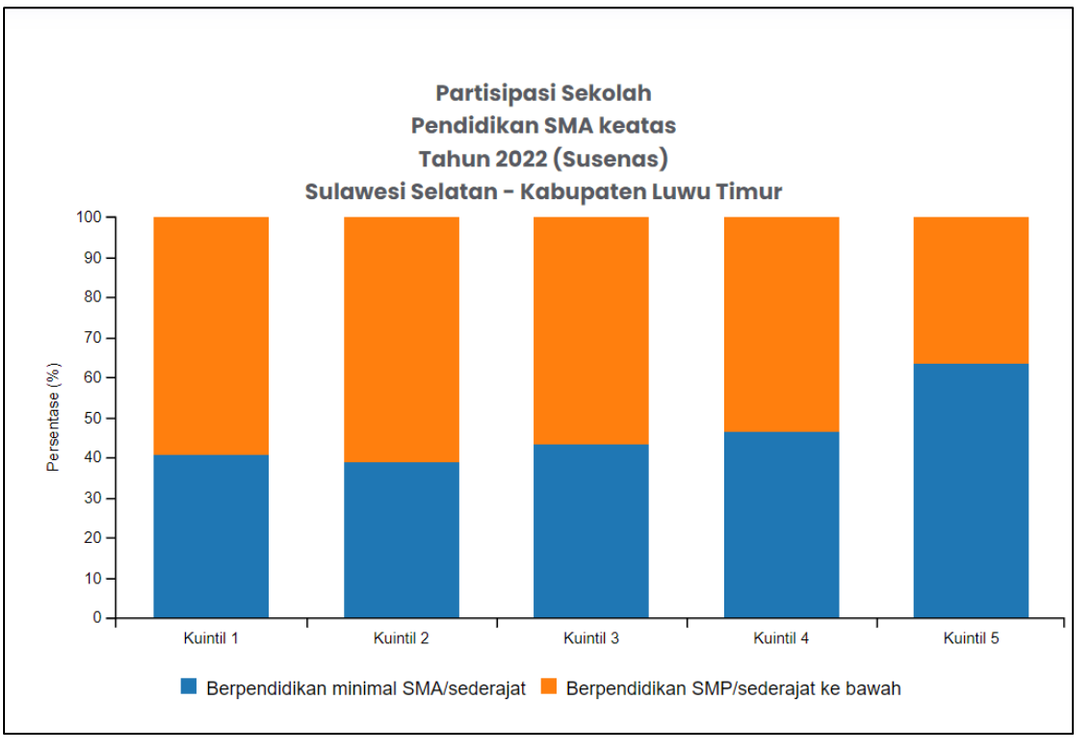

Indikator Pendidikan minimal SMA ke atas merupakan indikator dengan capaian paling rendah di antara indikator-indikator Pendidikan, dengan capaian sebesar 46.60%. Lebih dari itu, indikator ini mengalami masalah ketimpangan di mana penduduk 20% termiskin hanya memiliki capaian 40.77% sementara penduduk 20% terkaya sudah mencapai 63.59%, sehingga penduduk miskin harus diprioritaskan untuk penyelesaian masalah.

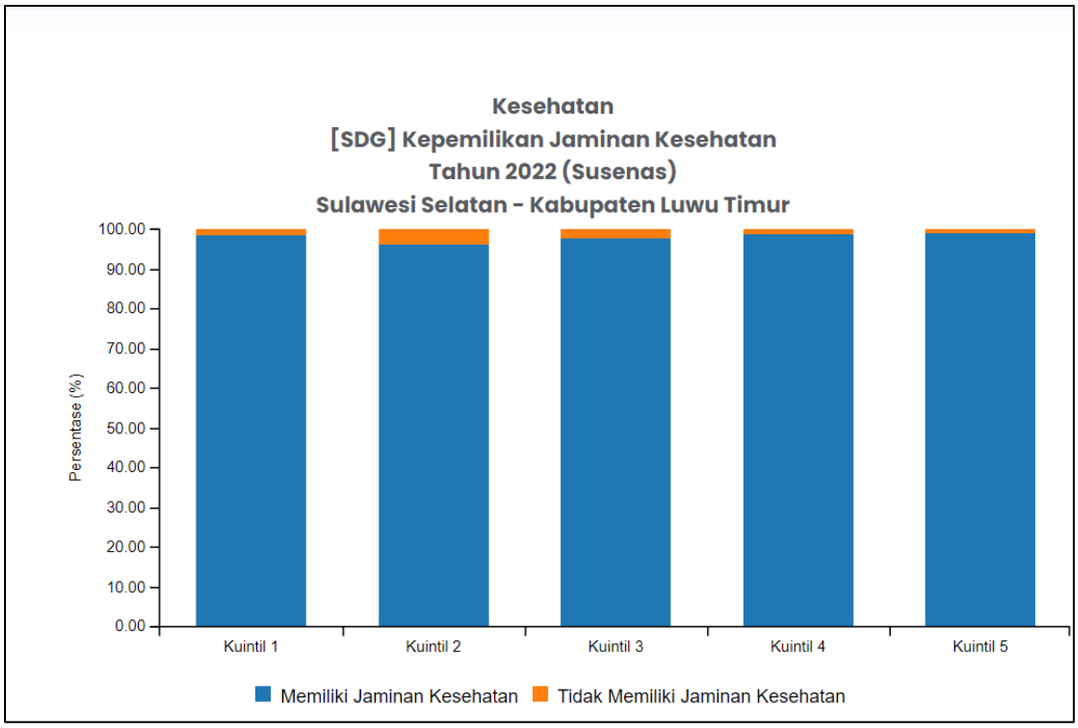

Indikator [TPB] Kepemilikan BPJSKes/Jamkesmas merupakan indikator dengan capaian paling rendah di antara indikator-indikator kesehatan, dengan capaian sebesar 98.10%. Padahal, indikator ini memiliki target yang harus dicapai, ditentukan dari peraturan mengenai SPM/SDG.Walau capaiannya merupakan yang terendah, indikator ini sudah mencapai target SPM/SDG, bersama indikator-indikator lain dalam Sorotan Kesehatan.Nilai capaian ini terdistribusi secara merata di seluruh kelompok kesejahteraan, sehingga ini bukan semata-mata masalah penduduk miskin.

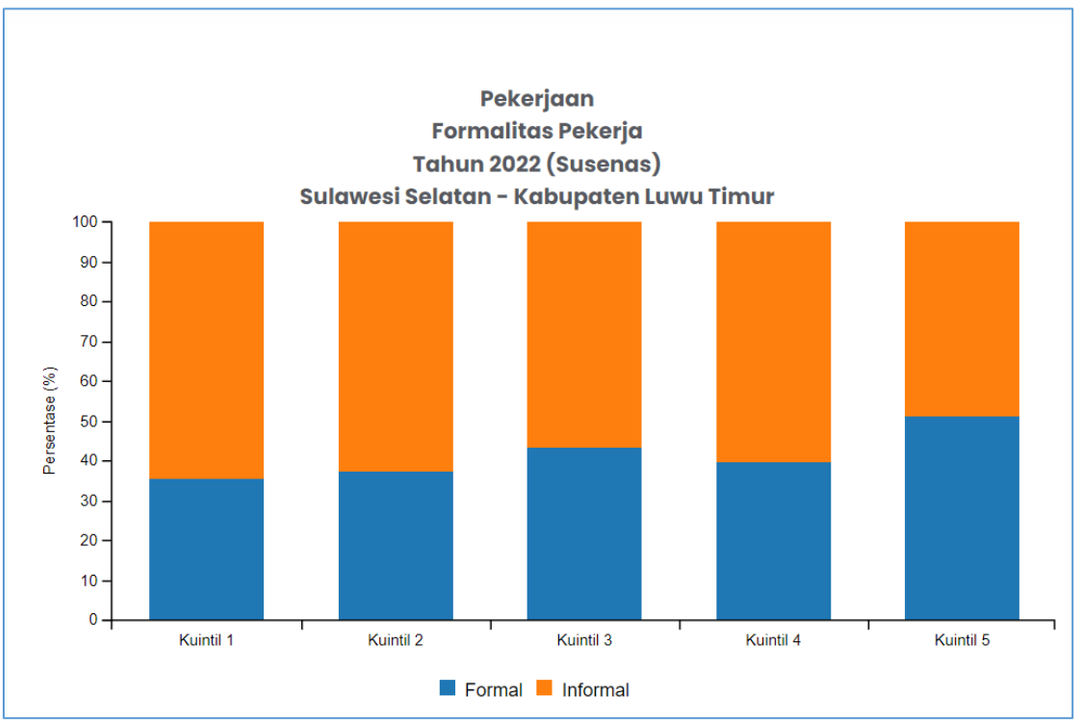

Indikator Status pekerjaan: formal/informal merupakan indikator dengan capaian paling rendah serta memiliki potensi ketimpangan, dengan capaian sebesar 58.10%. Dari sisi sektor pekerjaan, mayoritas tenaga kerja di PROV. SULAWESI SELATAN - KAB. LUWU TIMUR bekerja dalam sektor Pertanian, Kehutanan, Peternakan, dan Perikanan. Proporsi sektor pekerjaan di daerah ini cenderung homogen berdasarkan kelompok pengeluaran.

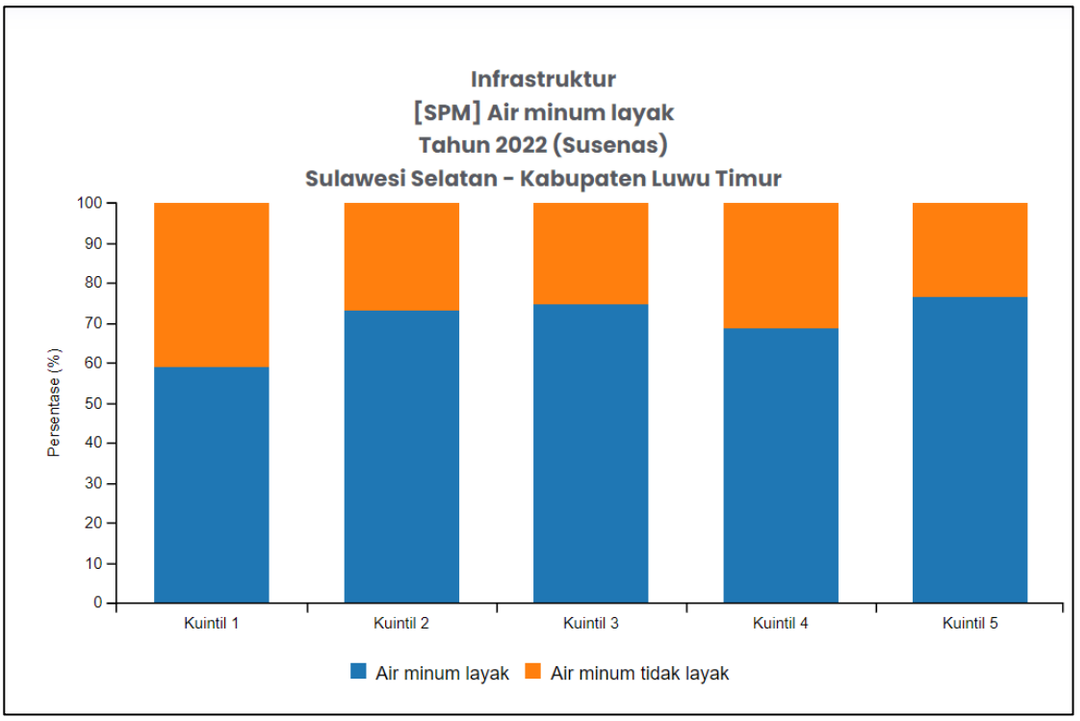

Indikator [SPM] Air Minum Layak merupakan indikator dengan capaian paling rendah di antara indikator-indikator Hunian Sosial, dengan capaian sebesar 28.90%. Padahal, indikator ini memiliki target yang harus dicapai, ditentukan dari peraturan mengenai SPM/SDG. Indikator ini masih 28.90% di bawah target SPM/SDG, sehingga patut menjadi perhatian lebih. Lebih dari itu, indikator ini mengalami masalah ketimpangan di mana penduduk 20% termiskin hanya memiliki capaian 58.98% sementara penduduk 20% terkaya sudah mencapai 76.57%, sehingga penduduk miskin harus diprioritaskan untuk penyelesaian masalah..

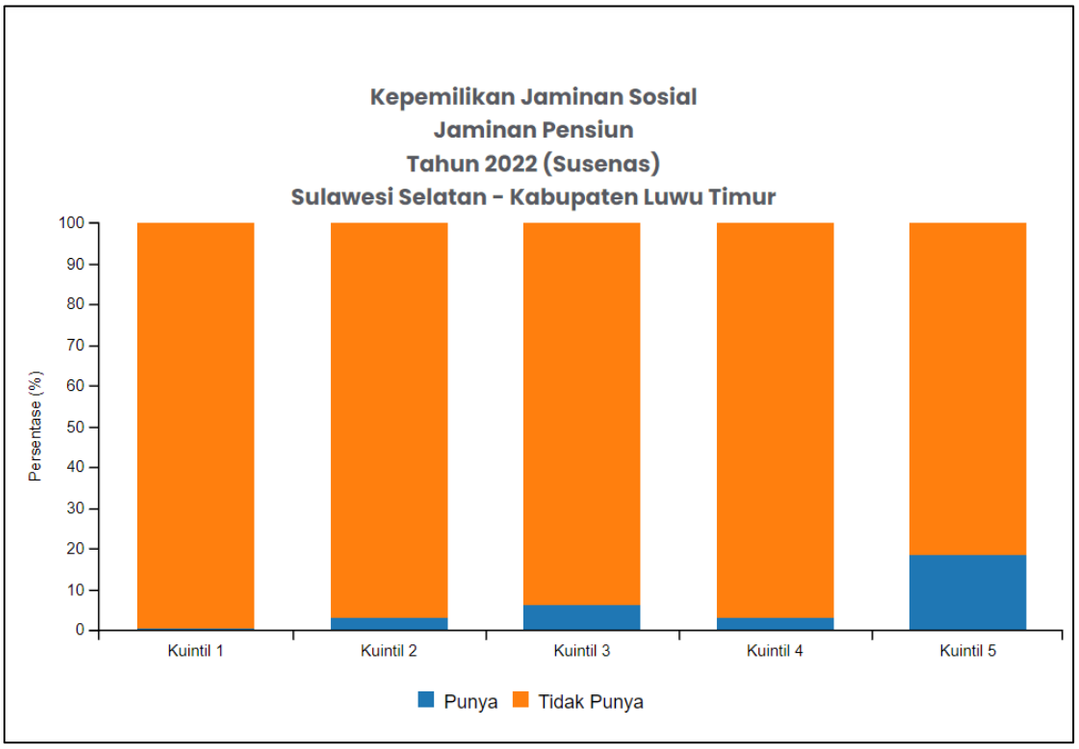

Indikator kepemilikan pensiun merupakan indikator dengan capaian paling rendah di antara indikator-indikator Perlindungan Sosial, dengan capaian sebesar 100.00%. Lebih dari itu, indikator ini mengalami masalah ketimpangan di mana penduduk 20% termiskin hanya memiliki capaian 0.51% sementara penduduk 20% terkaya sudah mencapai 18.38%, sehingga penduduk miskin harus diprioritaskan untuk penyelesaian masalah.

BAB III

KEBIJAKAN DAN STRATEGI TAHUN 2023

Berdasarkan Dokumen RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021-2026 pembangunan di Kabupaten Luwu Timur, tema pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mendukung kebijakan pembangunan daerah tahun 2023 diarahkan pada Tema **"Akselerasi Pertumbuhan ekonomi, penguatan infrastruktur daerah, dan pemenuhan layanan dasar".** Dengan mengakselerasi Pertumbuhan ekonomi dan Penguatan Infrastruktur sebagai dasar Pemerintah daerah untuk mengidentifikasi beberapa faktor dalam mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi daerah yang fokus pada sektor pertanian, dan Pariwisata dalam upaya mendorong perluasan lapangan kerja, peningkatan investasi, Peluang Usaha yang Berdaya Saing serta menjaga kualitas dan kuantitas infrastruktur yang ada, agar tetap berfungsi dengan baik dan mantap. Pemenuhan Layanan dasar dimaksudkan untuk memenuhi standar Pelayanan Minimal guna mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas. Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan subyek dari pembangunan yang harus ditingkatkan terus menerus dengan penguatan SDM Unggul yang sehat dan berpendidikan, SDM Unggul yang berkebudayaan dan Religius, dan SDM Unggul secara Ekonomi dengan Prioritas Pembangunan sebagai berikut:

1. Peningkatan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan;
2. Pemenuhan Prasarana dan Sarana Sektor Pertanian dan Pariwisata;
3. Penguatan Infrastruktur dalam Mendukung Sektor Pertanian dan Pariwisata;
4. Peningkatan Investasi dan Peluang Usaha yang Berdaya Saing;
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Inovatif;
6. Menjaga Toleransi Umat Beragama dan Kelestarian Nilai Budaya.

Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel 3.1 di bawah ini:

Tabel 3.1

Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Visi: Luwu Timur yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya			
Misi 1: Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh			
Mewujudkan peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat (T1)	Meningkatnya kualitas manusia yang berdaya saing (S1)	Mendorong kontribusi dunia usaha, kesadaran kritis kolektif, dan dukungan sarana/prasarana dalam meningkatkan derajat pendidikan dan literasi, lama hidup dan kesehatan, serta daya beli masyarakat. (St1)	• Penetapan dan penerapan kurikulum muatan local • Pemenuhan tenaga kesehatan secara merata dan proporsional • Peningkatan pendapatan masyarakat berdaya beli rendah
	Meningkatnya kualitas pembangunan desa yang merata dan berkelanjutan (S2)	Mengoptimalkan pemanfaatan dana dan koordinasi perangkat daerah dengan pemerintah desa dalam memperkuat ketahanan ekonomi, sosial dan ekologi desa dalam kerangka pemenuhan SDGs Desa (St2)	• Penguatan ketahanan sosial desa • Pengembangan usaha ekonomi dan pendapatan asli desa • Pengembangan kerjasama des
	Meningkatnya Kesetaraan Gender (S3)	Menguatkan Peran dan Kapasitas Perempuan dalam Pembangunan (St3)	Peningkatan kapasitas dan pemberdayaan perempuan dalam dunia usaha dan lembaga kemasyarakatan
Misi-2: Mengembangkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berjaringan luas			

Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang berkeadilan (T2)	Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah (S4)	Memanfaatkan teknologi terkini dan spirit milenial dalam meningkatkan produktivitas komoditas unggulan dengan didukung oleh inovasi daerah dan prasarana/sarana perdagangan (St4)	• pemanfaatan lahan pertanian pangan berbasis organik/semi organik dan petani milenial • Pengembangan ekonomi kreatif dan berbasis teknologi digita
	Meningkatnya ketersediaan lapangan kerja dan lapangan usaha (S5)	Meningkatkan daya saing tenaga kerja dan perkembangan start-up UMKM berbasis digital yang didukung oleh iklim investasi dan persaingan usaha yang baik (St5)	Perbaikan iklim investasi dan peluang usah
Misi 3: Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas			
Meningkatkan kapasitas dan kualitas infrastruktur daerah secara berkelanjutan (T3)	Meningkatnya daya guna dan hasil guna infrastruktur daerah (S6)	Meningkatkan kesadaran pemangku kepentingan dalam menjaga dan memelihara fungsi infrastruktur pekerjaan umum, perhubungan, pemukiman dan perumahan, serta sumberdaya air secara berkualitas diiringi dengan kepatuhan terhadap RTRW (St6)	Pembangunan, peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan infrastruktur pemukiman dan perumahan
	Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana (S7)	Memperkuat sistem pengelolaan lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati berbasis kontribusi multi pemangku kepentingan diiringi dengan peningkatan kapasitas dalam adaptasi dan mitigasi terhadap risiko bencana	Pengendalian pencemaran limbah dan bahan berbahaya serta kerusakan lingkungan hidup

		dan perubahan iklim (St7	
		Strategi 5: Pengembangan kapasitas usaha ekonomi	Penguatan kapasitas usaha kelompok miskin dan rentan melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial lainnya
Misi 4: Menciptakan kepemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik			
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani (T4)	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan (S8)	Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja dan perbaikan tata kelola keungan daerah diiringi dengan peningkatan profesionalisme SDM aparatur berbasis jabatan fungsional (St8)	• Pemantapan kinerja tata kelola keuangan • Pemantapan sistem pengawasan internal
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (S9)	Meningkatkan akurasi data, kesiapan sarana dan fasilitas, serta kesiapan SDM aparatur diiringi dengan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi serta standar operasional prosedur dalam pemenuhan SPM pelayanan dasar dan perbaikan kualitas pelayanan non SPM (St9)	Pemenuhan dan peningkatan kualitas layanan berbasis SPM

Misi 5: Mewujudkan ketenteraman dan ketertiban bagi seluruh warga masyarakat			
Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap norma ketertiban dan ketenteraman (T5)	Terpeliharanya rasa aman dan damai dalam masyarakat (S10)	Menguatkan peran kelembagaan masyarakat secara bersinergi dengan pemerintah daerah dalam menciptakan ketenteraman dan ketertiban serta rasa aman dan damai dalam masyarakat (St10)	• Deteksi dini potensi insiden terkait suku dan ras serta konflik sosial • Penghayatan dan pengamalan Pancasila serta pilar berbangsa lainnya
Misi 6: Menjamin keberlangsungan pembangunan yang berbasis pada agama dan budaya			
Meningkatkan toleransi dan kualitas kehidupan beragama serta ketahanan budaya daerah (T6)	Meningkatnya penerapan nilainilai agama dan budaya sebagai landasan pembangunan (S11)	Memperkuat peran forum kerukunan umat beragama serta pembinaan mental-spiritual diiringi dengan penguatan modal keragaman etnik dan suku dalam pemajuan kebudayaan (St11)	• Penetapan legalitas/sertifikat rumah ibadah semua agama • Pengelolaan cagar budaya secara terpadu • Wisata religius petugas agama

Sumber: Dokumen RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026

Arah Kebijakan Pembangunan di Kabupaten Luwu Timur yang diperuntukkan khusus untuk penanggulangan kemiskinan di tahun 2023 sesuai amanah dokumen RPKD Kabupaten Luwu Timur Periode Tahun 2021-2026 dapat dilihat dalam tabel 3.2 di bawah ini:

Tabel 3.2 Matriks Prioritas Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023

No	Bidang/ Urusan	Indikator Sasaran	Kebijakan	Program	Indikator/ Program	Tahun 2023		Lokasi	Sumber
						Kinerja	Pagu		
1	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**	**Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Nilai)**	**Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh (M1)**	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat Partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	100	171,314,074,297	LUWU TIMUR	APBD-DINAS PENDIDIKAN
					Tingkat Partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	100		LUWU TIMUR	APBD-DINAS PENDIDIKAN
					Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	100		LUWU TIMUR	APBD-DINAS PENDIDIKAN
					Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan	100		LUWU TIMUR	APBD-DINAS PENDIDIKAN
2	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**	**Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Nilai)**	**Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh (M1)**	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase capaian SPM bidang Kesehatan (%)	100	122,823,054,291	LUWU TIMUR	APBD-DINAS KESEHATAN
3				PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase tenaga kesehatan yang berkompeten (%)	81.66	5,504,550,000	LUWU TIMUR	APBD-DINAS KESEHATAN

4				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase desa/ kelurahan siaga aktif (%)	100	138,093,806,003	LUWU TIMUR	APBD-DINAS KESEHATAN
5				PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase tenaga kesehatan yang berkompeten (%)	81,66	5,504,550,000	LUWU TIMUR	APBD-DINAS KESEHATAN
6				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase desa/ kelurahan siaga aktif (%)	100	100,000,000	LUWU TIMUR	APBD-DINAS KESEHATAN
7	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**	**Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Nilai)**	**Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh (M1)**	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Prosentase PMKS yang diberikan bantuan sosial (%)	43,93	4,000,000,000.00	LUWU TIMUR	APBD-DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
8	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**	**Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Nilai)**	**Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh (M1)**	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Rata rata jumlah anak per keluarga (anak)	2.01	383,500,000	LUWU TIMUR	APBD-DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
9				PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalensi Rate/mCPR) (persen)	58.9	5,369,466,441	LUWU TIMUR	APBD-DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
10				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Rata-rata usia Kawin Pertama (Nilai)	21	965,019,015	LUWU TIMUR	APBD-DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**	**Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Nilai)**	**Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh (M1)**	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri (%) (Persen)	37.22	3,615,470,600	LUWU TIMUR	APBD-DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**	**Indek Desa Membangun (IDM) (Status Desa)**	**Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh (M1)**	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Peningkatan Penataan desa (%)	75	141,000,000	LUWU TIMUR	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**	**Indek Desa Membangun (IDM) (Status Desa)**	**Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh (M1)**	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Penetapan Kawasan Transmigran (%)	100	60,000,000	LUWU TIMUR	DINAS TRANSMIGRASI, DAN TENAGA KERJA
14				PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah Luas Wilayah Transmigrasi yang di Bangun (Ha)	50	265,000,000	LUWU TIMUR	APBD
15				PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Masyarakat Transmigran yang dibina (%)	100	345,000,000	LUWU TIMUR	APBD
16	**KECAMATAN**	**Indek Desa Membangun (IDM) (Status Desa)**	**Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh (M1)**	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	100	70,887,704	KECAMATAN ANGKONA	KECAMATAN ANGKONA
17				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	100	66,345,881	KECAMATAN BURAU	KECAMATAN BURAU
18				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	100	93,695,830	KECAMATAN KALENA	KECAMATAN KALENA
19				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Koordinasi, Fasilitasi, Konsultasi dan Supervisi Pembangunan Daerah (%)	100	328,080,720	KECAMATAN MALILI	KECAMATAN MALILI

20				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	100	80,114,021	KECAMATAN MANGKUTANA	KECAMATAN MANGKUTANA
21				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	100	435,441,442	KECAMATAN NUHA	KECAMATAN NUHA
22				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	100	736,039,074	KECAMATAN TOMONI	KECAMATAN TOMONI
23				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Koordinasi, Fasilitasi, Konsultasi dan Supervisi Pembangunan Daerah (%)	100	54,904,770	KECAMATAN TOMONI TIMUR	KECAMATAN TOMONI TIMUR
24				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	100	103,449,915	KECAMATAN TOWUTI	KECAMATAN TOWUTI
25				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	100	95,176,133	KECAMATAN WASUPONDA	KECAMATAN WASUPONDA
26				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	100	84,710,099	KECAMATAN WOTU	KECAMATAN WOTU
27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**	**Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (Nilai)**	**Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh (M1)**	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan (persentase)	100	150,000,000	LUWU TIMUR	APBD-DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

									PERLINDUNGAN ANAK
28				PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar,Anak Terlantar,Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti (Indikator SPM)('%) ('%)	100	1,235,000,000	LUWU TIMUR	APBD-DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
29	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**	**Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (Nilai)**	**Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh (M1)**	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Prosentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah ('%)	74.69	647,000,000	LUWU TIMUR	APBD-DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
					Prosentase partisipasi perempuan di lembaga swasta ('%)	25.31		LUWU TIMUR	APBD-DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
30				PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu ('%)	81.82	570,000,000	LUWU TIMUR	APBD-DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
31				PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Prosentase Ketersediaan Data dan Informasi Gender dan Anak di Tk. Kab/Kota ('%)	100	35,000,000	LUWU TIMUR	APBD-DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIND

									UNGAN ANAK
32				PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Prosentase indikator KLA yang terpenuhi (%)	100	350,000,000	LUWU TIMUR	APBD-DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
33				PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Prosentase anak korban kekerasan termasuk TPPO ('%)	100	-	LUWU TIMUR	APBD-DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
34				PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Ratio layanan pembelajaran keluarga (%)	0.1	160,000,000	LUWU TIMUR	APBD-DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
35	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**	**Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan (Persen)**	**Mengembangkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berjaringan luas(M2)**	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Cakupan pegelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan yang di kembangkan (%)	100	427,320,000	LUWU TIMUR	APBD-DINAS PERTANIAN
36				PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Presentase peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat (%)	100	249,577,883	LUWU TIMUR	APBD-DINAS PERTANIAN
37				PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Jumlah Kelanjutan Kelurahan Percontohan Mandiri Pangan (Kelurahan)	3	250,000,000	LUWU TIMUR	APBD-DINAS PERTANIAN
					Jumlah Desa Rentan rawan pangan (Desa)	2		LUWU TIMUR	APBD-DINAS PERTANIAN

38	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**	**Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan (Persen)**	**Mengembangkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berjaringan luas(M2)**	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase peningkatan produktifitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan koperasi (%)	4.9	30,563,680	LUWU TIMUR	APBD-DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
39				PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha (%)	45	232,215,324	LUWU TIMUR	APBD-DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
40				PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Rasio pertumbuhan skala usaha mikro (%)	3.89	114,461,660	LUWU TIMUR	APBD-DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
41	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan (Persen)**	**Mengembangkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berjaringan luas(M2)**	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Nelayan Tangkap (Ton)	10,216.00	2,184,225,525	LUWU TIMUR	APBD-DINAS PERIKANAN
42				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	315,710.00	4,500,000,000	LUWU TIMUR	APBD-DINAS PERIKANAN
43				PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Produksi Hasil Pengolahan Perikanan (Ton)	335	1,280,780,000	LUWU TIMUR	APBD-DINAS PERIKANAN
44	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**	**Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan (Persen)**	**Mengembangkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berjaringan luas(M2)**	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Presentase Meningkatnya Pengembangan Objek Wisata (Persen)	36.96	4,035,000,000	LUWU TIMUR	APBD-DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

45				PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Presentase meningkatnya Pemasaran Parwisata di Luwu Timur (Persen)	81.82	1,288,000,000	LUWU TIMUR	APBD-DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
46				PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Orang)	29.51	393,500,000	LUWU TIMUR	APBD-DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
47	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**	**Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan (Persen)**	**Mengembangkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berjaringan luas(M2)**	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah Populasi Unggas (ekor)	949,529.00		LUWU TIMUR	APBD-DINAS PERTANIAN
					Jumlah Produktivitas kelapa sawit (Ton/ Ha)	11.95		LUWU TIMUR	APBD-DINAS PERTANIAN
					Presentase Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian (Persen)	100		LUWU TIMUR	APBD-DINAS PERTANIAN
					Jumlah Produktivitas Jagung (Ton/ Ha)	6.51	9,470,900,894	LUWU TIMUR	APBD-DINAS PERTANIAN
					Jumlah Produktivitas padi (Ton/ Ha)	7.13		LUWU TIMUR	APBD-DINAS PERTANIAN
					Jumlah Produktivitas lada (Ton/ Ha)	0.97		LUWU TIMUR	APBD-DINAS PERTANIAN
					Jumlah Populasi ternak Kecil (ekor)	28,462.00		LUWU TIMUR	APBD-DINAS PERTANIAN

					Jumlah Produktivitas kakao (Ton/ Ha)	0.82		LUWU TIMUR	APBD-DINAS PERTANIAN	
					Jumlah Populasi ternak Besar (ekor)	24,109.00		LUWU TIMUR	APBD-DINAS PERTANIAN	
48				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	presentase Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian (Persen)	100	12,401,377,488	LUWU TIMUR	APBD-DINAS PERTANIAN	
49				PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	presentase pengendalian kesehatan hewan dan masyarakat veteriner (%)	100	894,299,600	LUWU TIMUR	APBD-DINAS PERTANIAN	
					Presentase penurunan kejadian kasus penyakit hewan menular (%)	1.4		LUWU TIMUR	APBD-DINAS PERTANIAN	
50				PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Presentase Perizinan usaha pertanian (Persen)			LUWU TIMUR	APBD-DINAS PERTANIAN	
51				PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Cakupan Bina Kelompok Tani (%)	100	75,000,000	LUWU TIMUR	APBD-DINAS PERTANIAN	
					Presentase Penyuluhan Pertanian (Persen)	58.57		LUWU TIMUR	APBD-DINAS PERTANIAN	
52	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**	**Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan (Persen)**	**Mengembangkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berjaringan luas(M2)**	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase peningkatan nilai ekspor (%)	100	3,745,441,100	LUWU TIMUR	APBD-DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	

53				PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase stabilitasi dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok (%)	15	340,421,000	LUWU TIMUR	APBD-DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
54				PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase penurunan pengaduan konsumen tentang alat UTTP (%)	8	362,833,635	LUWU TIMUR	APBD-DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
55	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**	**Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan (Persen)**	**Mengembangkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berjaringan luas(M2)**	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah peraturan Bupati (Perbub) kawasan industri yang ditetapkan (Dokumen)	5	188,857,100	LUWU TIMUR	APBD-DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
56	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**	**Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (Persen)**	**Mengembangkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berjaringan luas(M2)**	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Angka Partisipasi Angkatan Kerja (Orang)	158,900.00	-	LUWU TIMUR	APBD-DINAS TRANSMIGRASI, DAN TENAGA KERJA
57				PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (%)	75.7	1,382,000,000	LUWU TIMUR	APBD-DINAS TRANSMIGRASI, DAN TENAGA KERJA
58				PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Besaran Pencari Kerja Terdaftar yang ditempatkan (%)	42.57	544,000,000	LUWU TIMUR	APBD-DINAS TRANSMIGRASI, DAN TENAGA KERJA
59	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**	**Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (Persen)**	**Mengembangkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berjaringan luas(M2)**	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi yang meningkat manajemen pengelolaan melalui pendidikan dan pelatihan (%)	12.18	93,445,354	LUWU TIMUR	APBD-DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL

									DAN MENENGAH
60	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**	**Tingkat Penganggguran Terbuka (TPT) (Persen)**	**Mengembangkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berjaringan luas(M2)**	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Presentase Meningkatnya Pengembangan Ekonomi kreatif di Luwu Timur (Persen)	33.33	150,000,000	LUWU TIMUR	APBD-DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
61	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**	**Tingkat Penganggguran Terbuka (TPT) (Persen)**	**Mengembangkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berjaringan luas(M2)**	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat yang telah dibangun/direvitalisasi (%)	10	2,059,463,175	LUWU TIMUR	APBD-DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
62	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	**Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (Nilai)**	**Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas (M3)**	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio jaringan irigasi (Angka)	8.84	28,501,008,163	LUWU TIMUR	APBD-DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
					Persentase infrastruktur pengendali daya rusak air (%)	47.28		LUWU TIMUR	APBD-DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
63				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan Akses terhadap Air Minum Melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi (%)	60.18	11,800,000,000	LUWU TIMUR	APBD-DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

64				PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase infrastruktur persampahan yang dibangun (%)	54.16	23,105,000,000	LUWU TIMUR	APBD-DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
65				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD-S Akses Aman (%)	0.86	12,715,000,000	LUWU TIMUR	APBD-DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
66				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase saluran drainase dalam kondisi baik (%)	85.3	2,216,961,950	LUWU TIMUR	APBD-DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
67	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	**Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (Nilai)**	**Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas (M3)**	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase Panjang Jalan Jalan Yang dilengkapi Penerangan Jalan Umum (PJU) (%)	24.78	1,840,000,000	LUWU TIMUR	APBD-DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
68				PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Rasio rumah layak huni (%)	18.34	3,829,080,000	LUWU TIMUR	APBD-DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
					Persentase kawasan pemukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (%)	18.94		LUWU TIMUR	APBD-DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
69				PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase RTLH diluar kawasan permukiman kumuh yang ditangani (%)	2.89	55,080,000	LUWU TIMUR	APBD-DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

70				PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman di dukung dengan PSU (%)	21.05	24,000,000,000	LUWU TIMUR	APBD-DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
71	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**	**Indeks Risiko Bencana (IRB) (Nilai)**	**Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas (M3)**	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (%)	100	2,976,000,000	LUWU TIMUR	APBD-BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
					Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (%)	100			
					Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender (%)	100			
72	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**	**Indeks Risiko Bencana (IRB) (Nilai)**	**Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas (M3)**	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada saat dan setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/ Kotat (%) (%)	100	385,000,000	LUWU TIMUR	APBD-DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
73	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**	**Indeks Risiko Bencana (IRB) (Nilai)**	**Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas (M3)**	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase perbaikan kualitas air, udara dan tutupan lahan (Persen)	1	520,536,180	LUWU TIMUR	APBD-DINAS LINGKUNGAN HIDUP

74				PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase kelompok masyarakat yang dibina (Persen)	0	-	LUWU TIMUR	APBD-DINAS LINGKUNGAN HIDUP
75				PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase masalah lingkungan yang di selesaikan (Persen)	50	20,000,000	LUWU TIMUR	APBD-DINAS LINGKUNGAN HIDUP
76				PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase jumlah sampah yang tertangani (Persen)	72	4,600,000,000	LUWU TIMUR	APBD-DINAS LINGKUNGAN HIDUP
77	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**	**Indeks Risiko Bencana (IRB) (Nilai)**	**Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas (M3)**	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	presentase pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian (%)	100	400,000,000	LUWU TIMUR	APBD-DINAS PERTANIAN
78	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**	**IKM Pelayanan SPM (Nilai) (Nilai)**	**Menciptakan kepemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik(M4)**	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) (%)	99.85	468,653,500	LUWU TIMUR	APBD-DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
79				PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan penerbitan akta kelahiran (%)	96.55	428,637,500	LUWU TIMUR	APBD-DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
80				PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Cakupan Pengelolaan Informasi Kependudukan yang terintegrasi (%)	45	90,000,000	LUWU TIMUR	APBD-DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
81	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**	**IKM Pelayanan SPM (Nilai) (Nilai)**	**Menciptakan kepemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik(M4)**	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase peningkatan jumlah koperasi yang memiliki izin usaha simpan pinjam (%)	9.85	30,923,680	LUWU TIMUR	APBD-DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

82	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**	**IKM Pelayanan SPM (Nilai) (Nilai)**	**Menciptakan kepemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik(M4)**	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Ketepatan waktu penyelesaian Izin yang diterbitkan sesuai SOP (%)	75	365,650,000	LUWU TIMUR	APBD-DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
83	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**	**IKM Pelayanan SPM (Nilai) (Nilai)**	**Menciptakan kepemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik(M4)**	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase izin usaha industri kecil dan menengah yang terkendali (%)	90.9	40,000,000	LUWU TIMUR	APBD-DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
84	**SEKRETARIAT DAERAH**	**IKM Pelayanan SPM (Nilai) (Nilai)**	**Menciptakan kepemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik(M4)**	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase rekomendasi kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti dan dilaksanakan (%)	100	32,015,454,560	LUWU TIMUR	APBD-SEKRETARIAT DAERAH
85	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**	**Indeks Ketertiban dan Ketentraman (Nilai)**	**Mewujudkan ketentraman dan ketertiban bagi seluruh warga masyarakat(M5)**	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Warga Negara yang memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada (Persen)	100	9,284,025,050	LUWU TIMUR	APBD-DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
					Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan (Persen)	100			
					Persentase Penegakan Perda (Persen)	100			
86				PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATA	Persentase Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (Persen)	95.18	12,884,123,400	LUWU TIMUR	APBD-DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYEL

				N NON KEBAKARAN					AMATAN
					Cakupan pelayanan kebakaran kabupaten (Persen)	49.73		LUWU TIMUR	APBD-DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
					Persentase Desa/Kelurahan siap siaga kebakaran (Persen)	25.78		LUWU TIMUR	APBD-DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
					Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran (Persen)	100		LUWU TIMUR	APBD-DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
87	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**	**Cakupan penerapan nilai agama dalam masyarakat ('%)**	**Menjamin keberlangsungan pembangunan yang berbasis pada agama dan budaya(M6)**	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase peningkatan perekonomian masyarakat melalui pemberdayaan lembaga masyarakat , lembaga ekonomi dan pemanfaatan teknologi tepat guna (%)	65	1,294,961,393	LUWU TIMUR	APBD-DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
88	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**	**Cakupan penerapan nilai agama dalam masyarakat ('%)**	**Menjamin keberlangsungan pembangunan yang berbasis pada agama dan budaya(M6)**	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase jumlah pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya (%)	95	160,000,000	LUWU TIMUR	APBD-KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Sumber: Dokumen RPKD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026

BAB IV

P E N U T U P

Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Bengkulu Tahun 2021 disusun berdasarkan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Provinsi Bengkulu Tahun 2021 – 2021. Penyusunan RAT merupakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Perubahan Permendagri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2011 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2011 dan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan, diselaraskan atau dipadukan dengan Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 – 2026.

Dokumen Rencana Aksi Tahunan (RAT) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 merupakan acuan untuk melaksanakan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan. Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 diharapkan juga menjadi pedoman bagi seluruh stakeholder pembangunan di Kabupaten Luwu Timur oleh karena itu Rencana Aksi Tahunan (RAT) perlu diintegrasikan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Pelaksanaan Rencana Aksi Tahunan (RAT) penanggulangan kemiskinan diharapkan dapat melibatkan seluruh pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan. Pelaksanaan selain dilakukan oleh pemerintah daerah juga melibatkan dunia usaha/swasta, organisasi masyarakat, akedemisi, organisasi keagamaan, mitra pembangunan, dan media massa dan dalam melakukan pelaksanaan perlu mekanisme kerja, antara lain : 1) Koordinasi perencanaan sebagai langkah awal dari pelaksanaan rencana aksi; 2) Penentuan program/kegiatan prioritas, tujuan dan sasaran. Penentuan prioritas daerah juga perlu disinkronisasikan dengan prioritas yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat; 3) Koordinasi untuk membahas proses pelaksanaan, kendala dan berbagai faktor yang terjadi pada saat pelaksanaan.

Rencana Aksi Tahunan (RAT) diharapkan dapat menjadi pemicu percepatan penurunan tingkat kemiskinan melalui pendekatan yang komprehensif dan terpadu serta pelaksanaannya dilakukan secara bertahap, terencana dan berkesinambungan, dengan adanya Rencana Aksi Tahunan (RAT) penanggulangan kemiskinan ini diharapkan pemerintah daerah memiliki komitmen dan kejelasan perencanaan dan penganggaran program serta kegiatan untuk dapat menurunkan tingkat kemiskinan di Kabupaten Luwu Timur.